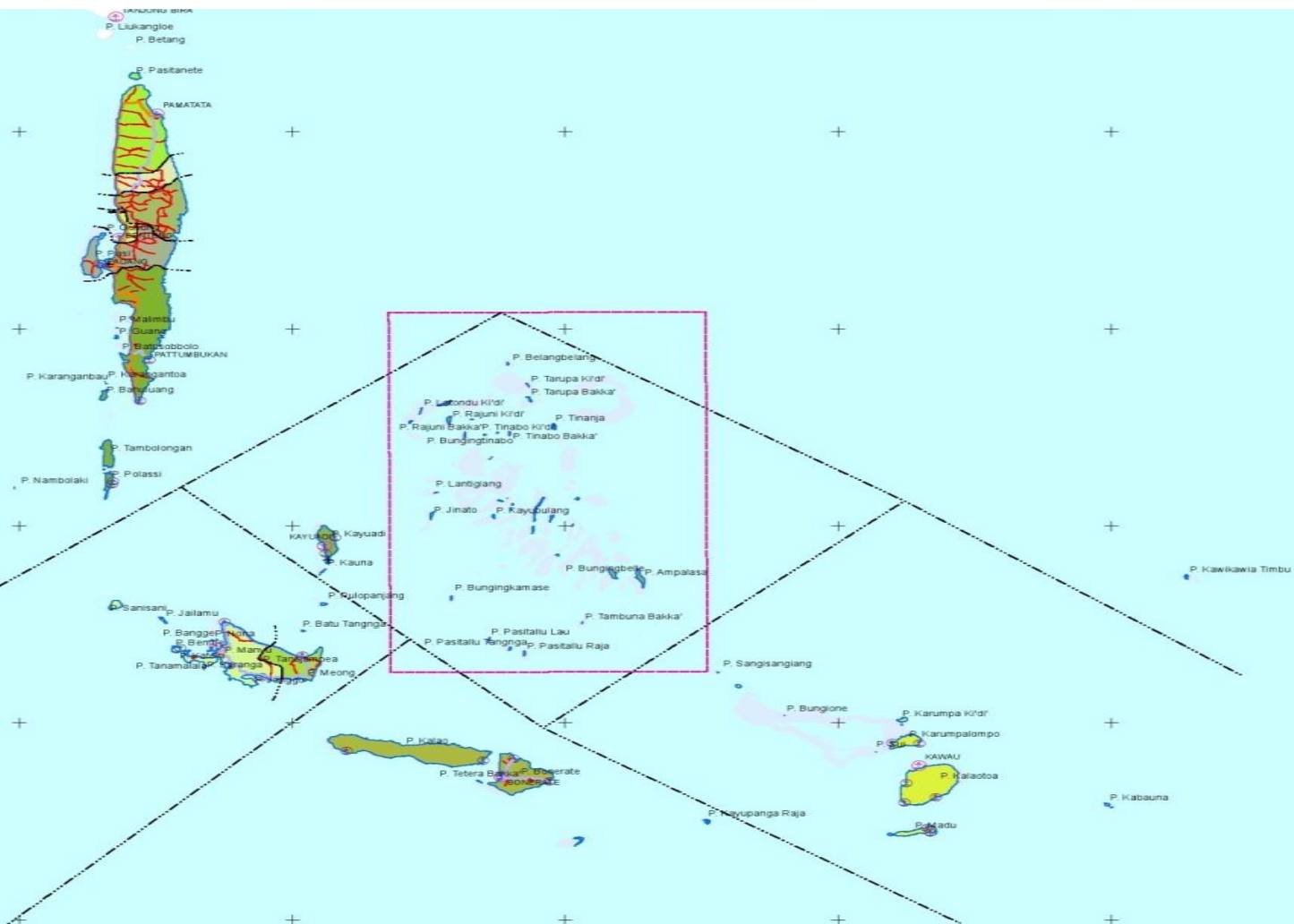




REVISI RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2016 - 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. K.H. Ahmad Dahlan Komp.TPI Bonehalang No.
Benteng – Selayar

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, sebagai ungkapan penghambaan dan rasa syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan Rakhmat-Nya dalam penyusunan Revisi Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021, sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan pada pelaksanaan tahun ke-2 yaitu tahun 2018 hingga sampai tahun 2021 nanti,

Revisi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar disusun sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan, mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2016 – 2021. Selanjutnya Renstra Perubahan ini dijadikan acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan periode 2018 - 2021 dan diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar terutama untuk sektor perikanan dan kelautan.

Proses penyusunan Renstra Perubahan ini telah melibatkan peran serta dari berbagai pihak baik secara internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar maupun instansi lain. Olehnya itu ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang turut membantu selama proses penyusunannya.

Akhir kata semoga dokumen ini bermanfaat bagi Dinas Kelautan dan Perikanan demi kemajuan dan perkembangan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar hingga tahun 2021.

Benteng, Januari 2018

KEPALA DINAS

Ir. MAKKAWARU

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19630120 198910 1 003

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.3.1 Maksud	7
1.3.2 Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar	10
2.2 Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan	23
2.2.1 Sumber Daya Aparatur	23
2.2.2 Sarana dan Prasarana Operasional	24
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	26
2.4.1 Tantangan Pelayanan	30
2.4.2 Peluang Pelayanan	31
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	34
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	34
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	41
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan	45
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan ...	45
3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan	47
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD.....	51
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	51
3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	56
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.....	60
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	65
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	71
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	74
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	100
BAB VIII. PENUTUP	105

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Jumlah PNS Menurut Golongan	23
Tabel 2.2 Jumlah dan Komposisi Kepangkatan Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan	23
Tabel 2.3 Sarana dan Operasional Kantor yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kepulauan Selayar	24
Tabel 2.4 Sarana dan Operasional Penunjang Pembangunan Kelautan dan Perikanan	25
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	27
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode Tahun 2011 – 2015	29
Tabel 2.7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar	32
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar	38
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	44
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan DKP Kab. Kep. Selayar berdasarkan Sasaran Renstra KKP beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	46
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan DKP Kab. Kep. Selayar berdasarkan Sasaran Renstra DKP Propinsi Sulawesi Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	50
Tabel 3.5 Perumusan Mitigasi, Alternatif, dan Rekomendasi Perkiraan Dampak Program Pembangunan di Wilayah Pesisir dan Laut berdasarkan Tupoksi DKP Kab. Kep. Selayar	59
Tabel 3.6 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	62
Tabel 3.7 Nilai Skala Kriteria	62
Tabel 3.8 Rata-rata Skor Kriteria Isu-Isu Strategis	63
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar	68
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar	71
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif	80
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJM	104

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tiga pilar pembangunan nasional, yaitu Kedaulatan (sovereignty), Keberlanjutan (sustainability), dan Kesejahteraan (prosperity), dimana pembangunan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan bagian integral dalam pembangunan daerah dan nasional yang secara prinsipil direncanakan serta disusun sebagai satu kesatuan perencanaan nasional, dilakukan secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, diintegrasikan dengan tata ruang wilayah dengan memperhatikan potensi dan prioritas daerah serta dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan regional, maka pembangunan bidang kelautan dan perikanan memerlukan langkah-langkah terobosan yang merupakan upaya terintegrasi dan saling memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan kelautan dan perikanan, terutama untuk mendukung program kedaulatan pangan serta meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016 - 2021 merupakan suatu proses yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016 – 2021 dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (Lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan

tantangan yang ada serta memuat visi dan misi pemerintah daerah sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan dan prioritas sasaran tahun 2016-2021.

Revisi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016 - 2021 ini merupakan revisi dari dokumen Renstra sebelumnya yang telah disusun. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor dan pertimbangan, antara lain : (i) Adanya perubahan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap beberapa urusan pemerintahan sebagai konsekuensi dari Perubahan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (ii) Adanya revisi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar; (iii) adanya beberapa indikator kinerja yang perlu penyelarasan lebih lanjut dengan substansi yang telah termuat dalam revisi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021.

Revisi Renstra SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016-2021 ini merupakan penjabaran visi, misi dan Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan dilaksanakan dalam sisa periode tiga (3) tahun terakhir yaitu untuk tahun 2018 s.d. 2018 menyesuaikan dengan Revisi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016-2021, memperhatikan sumberdaya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis dalam Rencana Kerja Tahunan (RENJATA) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum terkait penyusunan Revisi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun

- 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 22. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 77 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 (lembaran daerah No. tahun 2017);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
 26. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Revisi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 – 2021 dimaksudkan untuk menggambarkan kebijakan dan program strategis dalam skala prioritas yang lebih terarah yang hendak dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Revisi Renstra SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan periode 2016 – 2021 ini adalah :

1. Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2018-2021, yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program, kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran.
2. Sebagai komitmen seluruh penyelenggara SKPD terkait terhadap kesepakatan program dan kegiatan serta target capaian yang dituangkan ke dalam Dokumen Renstra ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar ini disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN. Bagian ini memuat uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, memuat informasi tentang tugas, fungsi, dan struktur Organisasi

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumberdaya yang dimiliki, dan kinerja pelayanan melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.

- BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan; Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan, Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan Isu – isu strategis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, yang memuat tujuan dan sasaran jangka menengah berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengacu pada Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, yang memuat strategi dan kebijakan berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan
- BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, memuat uraian tentang penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan, sampai tahun 2021.
- BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yang akan dicapai dalam tiga (3) tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran RPJMD

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28).

Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perikanan. Sementara dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
2. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
3. Melaksanakan fungsi administrasi di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan
4. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

II. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Hukum, Perencanaan, dan Pelaporan
3. Sub Bagian Keuangan

III. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Perikanan Tangkap, terdiri atas :

1. Seksi Pendampingan Nelayan Kecil
2. Seksi Kemitraan Usaha Nelayan Kecil
3. Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan

IV. Bidang Pemberdayaan Usaha kecil Pembudidayaan ikan, terdiri atas :

1. Seksi Pendampingan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan
2. Seksi Kemitraan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan
3. Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan

V. Bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Penerbitan SIUP Budidaya, terdiri atas :

1. Seksi Penerbitan SIUP Pembudidayaan Ikan
2. Seksi Penerbitan TPUPH dan TPKPIH
3. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI

VI. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri atas :

1. Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya
2. Seksi Pengelolaan Lahan dan Pakan
3. Seksi Perbenihan

VII. Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) organisasi Dinas Kelautan & Perikanan Kabupaten Selayar adalah sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

Secara umum Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan di bidang Kelautan dan Perikanan sesuai kebijakan Bupati dengan memperhatikan petunjuk/pedoman teknis Menteri Kelautan dan Perikanan.

Adapun uraian tugas pokok Kepala Dinas, yaitu :

- a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagaimana pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. merumuskan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. menyelenggarakan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- k. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

II. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis administrasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas, mempunyai fungsi : mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas; mengkoordinasikan penyusunan program, pelaporan, dan hukum; mengkoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; mengkoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk dan pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memparaf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya
- f. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan staf baik teknis maupun administrasi kepada Kepala Dinas dan semua bidang di lingkungan Dinas Kelautan dan perikanan;
- g. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dokumentasi, kearsipan, dan kepastakaan;
- h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyusunan program/kegiatan bidang Kelautan dan Perikanan;

- i. melaksanakan fasilitas penyusunan konsep rancangan peraturan dan keputusan bidang Kelautan dan Perikanan;
- j. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan bidang Kelautan dan Perikanan;
- k. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- l. melaksanakan penatausahaan, perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan keuangan
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

III. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Perikanan Tangkap

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis koordinasinya melalui Sekretaris. Secara umum Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Perikanan Tangkap mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan administrasi di bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Perikanan Tangkap.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Perikanan Tangkap sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Perikanan Tangkap untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil;
- g. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi program dan kegiatan pemberdayaan nelayan;
- h. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi program dan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- i. melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil;
- j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Perikanan Tangkap dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

IV. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis koordinasinya melalui Sekretaris. Secara umum Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan administrasi di bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas pokok :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- g. melaksanakan administrasi dan teknis penyelenggaraan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- h. melaksanakan koordinasi fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- i. melaksanakan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- j. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk pembudidayaan ikan.

- k. melaksanakan pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- l. melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses Ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada usaha kecil pembudidaya.
- m. melaksanakan pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidaya ikan.
- n. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi program dan kegiatan kemitraan dan pembinaan kelompok;
- o. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi program dan kegiatan pendidikan, pelatihan dan pendampingan;
- p. melakukan pembinaan dan pengembangan kegiatan pendidikan, kemitraan usaha dan pembinaan kelembagaan;
- q. melakukan penumbuhan dan peningkatan kuantitas dan kualitas kelembagaan pelaku usaha kecil pembudidayaan ikan;
- r. melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas serta upaya diversifikasi usaha kecil pembudidayaan ikan.
- s. melakukan promosi potensi pengembangan usaha kecil pembudidayaan ikan.
- t. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan ikan dan memberi saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan.
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

V. Bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya

Bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang secara teknis koordinasinya melalui Sekretaris. Secara umum Kepala Bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan administrasi di Bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok :

- a. Menyusun rencana kegiatan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;

- f. Membagi tugas kepada kepala seksi dan staf sesuai dengan bidang tugasnya melalui disposisi atau secara lisan;
- g. Memberi petunjuk kepada kepala seksi dan staf di bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya untuk memaksimalkan kinerja masing-masing;
- h. Mengoordinasikan para kepala seksi melalui rapat atau langsung agar terjalin kerjasama yang saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- i. Memeriksa hasil kerja dan menilai prestasi kerja kepala seksi dan staf di bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya agar sesuai dengan rencana kerja dinas;
- j. Mengadakan kerjasama dengan bidang dan unit kerja lainnya dalam rangka peningkatan efektifitas Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya;
- k. Memberikan saran kepada pimpinan mengenai permasalahan di bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya;
- l. Menyusun dan membuat laporan kegiatan di lingkup bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya;
- m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala Bidang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

VI. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang secara teknis koordinasinya melalui Sekretaris. Secara umum Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, serta melaksanakan evaluasi, pelaporan, dan administrasi di Bidang Perikanan Budidaya.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok :

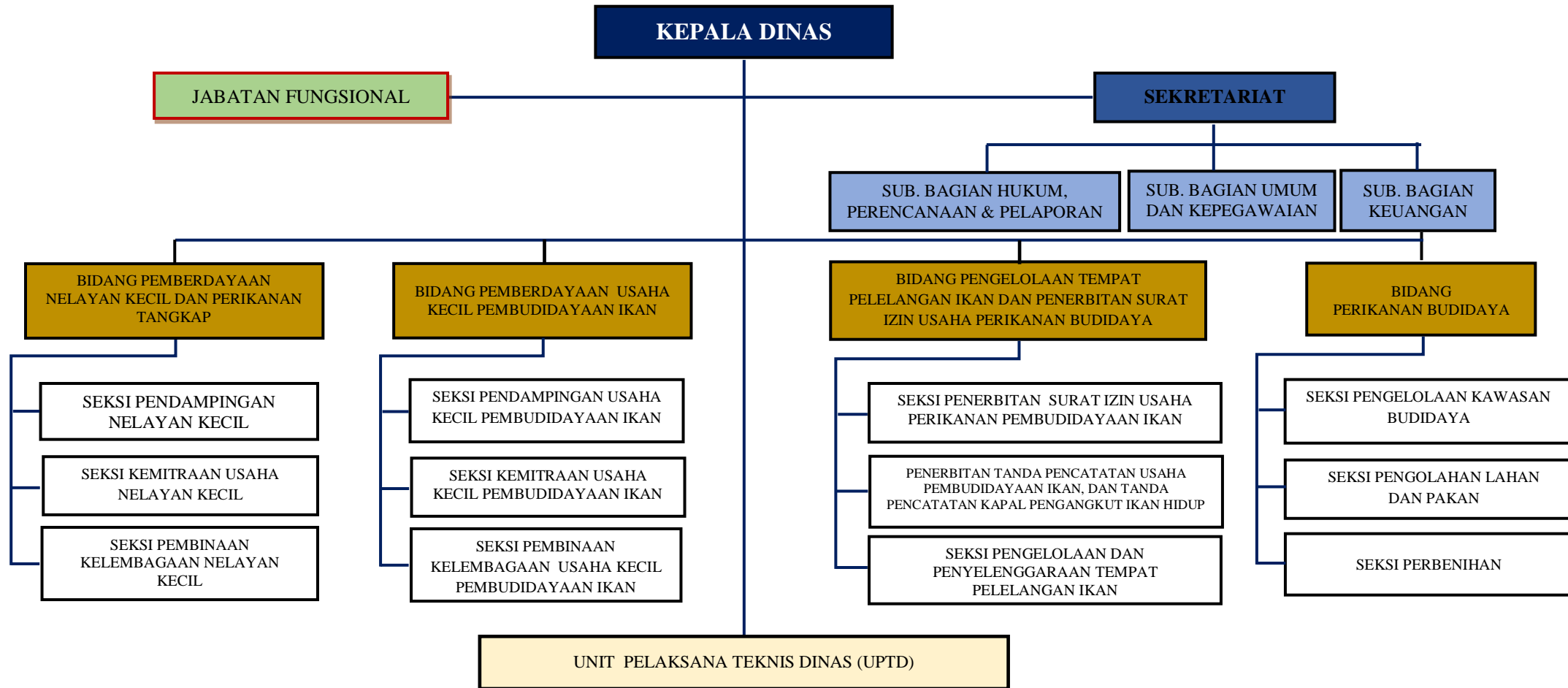
- a. Menyusun rencana kegiatan Perikanan Budidaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perikanan Budidaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pembudidayaan Ikan;
- g. Melaksanakan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan;
- h. Melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya;
- i. Melaksanakan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan digunakan pembudidaya ikan;

- j. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya berdasarkan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- k. Melaksanakan pembinaan cara pembesaran ikan yang baik;
- l. Melaksanakan pengelolaan, perbanyak dan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk yang bermutu;
- m. Melaksanakan pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang Baik;
- n. Melaksanakan pelestarian benih ikan, calon induk dan induk ikan;
- o. Melaksanakan kebijakan pengembangan dan percontohan perikanan budidaya;
- p. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

VII. Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan

Unit pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang menyediakan bahan pembinaan dan koordinasi kegiatan bina usaha hasil produksi perikanan.

GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
(PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 68 TAHUN 2016)



2.2 Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kep. Selayar

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Pada tahun 2017 tercatat jumlah Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 44 orang. Adapun jumlah dan komposisi kepangkatan pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Jumlah PNS Menurut Golongan

GOLONGAN	JUMLAH
Golongan I	-
Golongan II	8
Golongan III	33
Golongan IV	3
JUMLAH	44

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar, 2017.

Tabel 2.2

Jumlah dan Komposisi Kepangkatan Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan

No	PEGAWAI	PENDIDIKAN					JUMLAH
		SMA	DIII	S1	S2	S3	
A.	PEMEGANG ESALON						
1.	Esalon II	-	-	1	-	-	1
2.	Esalon III	-	-	3	2	-	5
3.	Esalon IV	1	-	13	3	-	17
	<i>Sub Jumlah</i>	1	-	16	6	-	23
B.	NON ESALON						
1.	Staf	9	1	10	-	-	20
2.	Kontrak	11	3	43	-	-	57
3.	Sukarela	4	-	10	1	-	15
	<i>Sub Jumlah</i>	24	4	63	1	-	93
	TOTAL	25	4	79	8	-	116

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kep. Selayar, 2017.

Pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa sebagian besar pegawai pada lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan berada pada tingkat/golongan III dengan kualifikasi pendidikan sarjana (S1) dan

pascasarjana (S2/S3). Hal ini menunjukkan bahwa kualifikasi sumberdaya aparatur di lingkup ini sudah memadai. Selain itu, juga terdapat Pegawai Tidak Tetap sebanyak 93 orang yang sebagian besar juga berlatar belakang sarjana di bidang kelautan dan perikanan.

Jumlah UPTD yang terbentuk saat ini ada 1 unit yaitu UPTD Hatchery yang direncanakan menjadi UPTD BBI. Aparatur yang ditempatkan di UPT tersebut juga masih sangat terbatas, sementara wilayah cakupan binaannya masih luas.

2.2.2 Sarana dan Prasarana Operasional

Sarana dan prasarana operasional yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Sarana dan Operasional Kantor yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

No.	Uraian	Sumber	Tahun	Jumlah	Ket.
1	Gedung Kantor	na	na	7 Unit	
2	Mobil	na	na	5 Unit	
3	Motor	na	na	32 Unit	
4	Motor Tiga Roda	na	na	3 Unit	
5	Kapal Motor/Jolloro	na	na	7 Unit	
6	Kapal Reaksi Cepat	na	na	2 Unit	
7	Kapal Pengangkut	na	na	1 Unit	
8	Komputer	na	na	24 Unit	
9	Laptop/Notebook	na	na	35 Unit	
10	Mesin Ketik	na	na	10 Unit	
11	Kursi Kerja	na	na	10 Unit	
12	Kursi Tamu	na	na	1 Unit	
13	Kursi Rapat	na	na	30 Unit	
14	Lemari Arsip	na	na	6 Unit	
15	Lemari Besi	na	na	11 Unit	
16	Lemari Kayu	na	na	3 Unit	
17	Printer	na	na	21 Unit	
18	Kamera Digital	na	na	12 Unit	
19	UPS	na	na	3 Unit	

Sarana dan prasarana perkantoran juga telah meningkat, dimana alat bantu kerja seperti komputer dan laptop telah tersedia dengan jumlah yang cukup. Kendaraan operasional baik darat maupun laut juga telah memadai. Namun luasan gedung kantoryang tersedia tidak dapat lagi menampung jumlah staf yang ada, sehingga kinerja staf di kantor menjadi kurang efektif.

Sedangkan sarana dan prasarana penunjang pembangunan di bidang kelautan dan perikanan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Sarana dan Operasional Penunjang Pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Uraian	Jumlah	Keterangan	Sumber
1	Pabrik Es	9 Unit	4 operasional	APBN
2	Tambatan Perahu	5 Unit	baik	APBD
3	Pos Pengawas/Pondok Wisata	5 Unit	baik	APBD
4	Pangkalan Pendaratan Ikan Bonehalang (Luas Lahan 5 ha) - Gedung Kantor UPT - Dermaga - Tempat Pelelangan Ikan - Pabrik Es - Cold Storage - Gudang - Jalan Kompleks - Gedung Workshop - Jaringan Air Bersih	1 Unit	baik	APBD/ APBD
5	Tempat Pelelangan Ikan Kayuadi - Dermaga, TPI, dan Pabrik Es	1 Unit	Baik/ operasional	APBN
6	Hatchery Baloiya	1 Unit	baik	APBD
7	Tambak (M ²)	10.000	baik	
8	Mobil Berefrigasi	1 Unit	baik	APBN

2.3

Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai instansi teknis di bidang kelautan dan perikanan memberikan pelayanan dalam hal mengembangkan pembangunan di sektor ini meliputi peningkatan produksi perikanan dan peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya.

Tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran atau target renstra Dinas Kelautan dan Perikanan periode Tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada tabel 2.5, sedangkan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan pada lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Periode Tahun 2011 s.d Tahun 2015

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Produksi Ikan (Ton)																		
	Produksi Ikan Perikanan Tangkap(Ton)	-	-	-	na	na	Na	na	na	19.906,1	29.875,9	28.573,0	28.959,2	24.155,8	-	-	-	-	-
	Produksi Ikan Perikanan Budidaya (Ton)	-	-	-	na	na	Na	na	na	12.225,76	12.192,65	11.384,89	7.983,48	804,93	-	-	-	-	-
2	Konsumsi Ikan (Kg /orang /tahun)	-	-	-	na	na	Na	na	na	44,30	44,80	45,67	46,12	49,45	-	-	-	-	-
3	Cakupan Bina Kelompok																		
	POKLAHSAR	-	-	-	na	na	Na	na	na	15	21	37	20	28	-	-	-	-	-
	KUB	-	-	-	na	na	Na	na	na	9	22	29	32	40	-	-	-	-	-
	POKDAKAN	-	-	-	na	na	Na	na	na	11	12	20	36	38	-	-	-	-	-
	KUGAR	-	-	-	na	na	Na	na	na				11	3	-	-	-	-	-
	POKMASWAS	-	-	-	na	na	Na	na	na	52	52	52	52	52	-	-	-	-	-
4	Produksi Perikanan Kelompok (kg/tahun)																		
	a. Produksi Abon	-	-	-	na	na	Na	na	na	-	300	420	515	600	-	-	-	-	-
	b. Produksi Terasi	-	-	-	na	na	Na	na	na	223	340	435	621	729	-	-	-	-	-
	c. Produksi Bakso	-	-	-	na	na	Na	na	na	-	-	-	-	120	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	d. Produksi Komoditas Ikan Kerapu	-	-	-	na	na	Na	na	na	4,00	4,00	6,14	3,93	15,04	-	-	-	-	-
	e. Produksi Komoditas Rumput Laut	-	-	-	na	na	Na	na	na	11.054,00	11.003,00	10.665,02	7.655,77	285,51	-	-	-	-	-
	f. Produksi Komoditas Ikan Lele	-	-	-	na	na	Na	na	na					1,2	-	-	-	-	-
	g. Produksi Komoditas Udang									951,20	1.040,70	580,12	238,46	335,24					
	h. Produksi Komoditas Ikan Bandeng	-	-	-	na	na	Na	na	na	209	138,4	130,85	84,21	166,79	-	-	-	-	-
5	Luas Budidaya Ikan Karang (m ²)	-	-	-	na	na	Na	na	na	5.914,0	5.914,0	3.456,0	3.456,0	2.001,8	-	-	-	-	-
6	Luas Lahan Budidaya Rumput Laut (Ha)	-	-	-	na	na	Na	na	na	4.102	4.102	4.102	4.102	120	-	-	-	-	-
7	Jumlah Nelayan yang mempunyai Armada dan Alat Tangkap (RTP)	-	-	-	na	na	Na	na	na	6.505	7.046	7.153	7.165	6.974	-	-	-	-	-
8	Persentase Kontribusi Sektor Perikanan dan Kelautan terhadap PDRB (%)	-	-	-	na	na	Na	na	na	19,79	21,68	23,00	24,98	20,58	-	-	-	-	-

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar
Periode Tahun 2011 – 2015

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 1.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp. 1.000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
A	PENDAPATAN DAERAH																
	n.a	n.a	145.000	198.000	223.000	n.a	n.a	123.596.000	138.645.050	62.798.000	n.a	n.a	85,24	70,02	28,16	24,59	(21,26)
B	BELANJA																
	n.a	n.a	15.655.637	18.884.236	15.727.863	n.a	n.a	14.725.923.231	17.905.406.325	14.305.894.093	n.a	n.a	94,06	94,82	90,96	1,95	0,75
	Belanja Tidak Langsung																
	n.a	n.a	2.522.042	2.538.050	2.930.050	n.a	n.a	2.295.420.802	1.899.228.412	2.024.824.347	n.a	n.a	91,01	74,83	69,11	8.04	(5,23)
	Belanja Pegawai																
	n.a	n.a	2.522.042	2.538.050	2.930.050	n.a	n.a	2.295.420.802	1.899.228.412	2.024.824.347	n.a	n.a	91,01	74,83	69,11	8.04	(5,23)
	Belanja Langsung																
	8.090.235	7.844.594	13.133.595	16.346.186	12.797.813	n.a	n.a	12.430.502.429	16.006.177.913	12.281.069.746	n.a	n.a	95,09	97,92	95,96	16.79	2,75
	Belanja Pegawai																
	568.635	359.130	618.930	787.330	820.250	n.a	n.a	614.510.000	781.030.000	815.820.000	n.a	n.a	94,65	99,20	99,46	24.83	6.45
	Belanja Barang Jasa																
	6.238.075	4.521.745	9.402.104	11.369.578	9.205.578	n.a	n.a	9.345.381.429	11.237.953.412	8.829.367.850	n.a	n.a	99,40	98,84	95,91	20.58	1.18
	Belanja Modal																
	1.283.525	2.927.719	3.112.561	4.189.452	2.772.500	n.a	n.a	2.470.611.000	3.987.194.501	2.635.874.896	n.a	n.a	79,38	95,17	95,07	33.80	13.55

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar

2.4.1 Tantangan Pelayanan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut di atas menggambarkan kinerja pelayanan yang masih rendah. Kondisi tersebut tidak terlepas dari beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi. Adapun tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- a. Ketersebaran dan luasnya jangkauan pelayanan pada masyarakat pelaku utama perikanan serta terbukanya akses terhadap sumberdaya perikanan tangkap.
- b. Masih rendahnya kualitas SDM (keterampilan, akses modal dan pasar, etos kerja) dan kelembagaan pelaku utama perikanan (nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan).
- b. Struktur dan kualitas prasarana dan sarana penangkapan ikan yang masih terbatas.
- c. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya pesisir dan maraknya kegiatan penangkapan ikan secara illegal
- d. Terbatasnya jaringan distribusi dan konektivitas hulu-hilir hasil kelautan dan perikanan.
- e. Terbatasnya data dan informasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.
- f. Rendahnya penerimaan daerah (PAD) yang bersumber dari sektor kelautan dan perikanan.
- g. Lemahnya koordinasi lintas SKPD dan koordinasi penegakan hukum.

- h. Terbatasnya kewenangan Pemerintah Kabupaten atas pengelolaan ruang laut dan perijinan perikanan dengan keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.4.2 Peluang Pelayanan

Sementara peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yang dapat dioptimalkan antara lain :

- a. Masih tingginya potensi sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagai modal pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar
- b. Dukungan Pemerintah Daerah dalam RPJMD terkait pengembangan kawasan perikanan terpadu.
- c. Kebijakan Pemerintah Daerah yang menempatkan sector kelautan dan perikanan sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam RPJM Kabupaten Kepulauan Selayar.
- d. Kebijakan pembangunan sector kelautan dan perikanan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan melalui penetapan visi yaitu Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan Masyarakat.
- e. Tingginya minat investor dalam pengembangan sector kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
- f. Sinergitas program antara SKPD
- g. Agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita ke-7 pada **Sub Agenda** Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui Peningkatan Produksi Perikanan dan **Sub Agenda** Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan.

Tabel 2.7

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
Peningkatan Produksi Perikanan Nasional tahun 2019 sebesar 39,97 juta ton ((Renstra KKP)	Produksi perikanan : (24.960,73 ton) - Perikanan Tangkap (24.155,8 ton) - Perikanan budidaya (804,93 ton)	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	- Peningkatan kapasitas nelayan/ pembudidaya (pelatihan, sosialisasi, bantuan sarana perikanan) - Mengembangkan prasarana dan fungsi kawasan industri perikanan	- Anggaran - Regulasi - Perijinan	- Struktur dan kualitas alat/ sarana penangkapan ikan nelayan dan pembudidaya yang rendah. - Rendahnya kualitas SDM dan kelembagaan pelaku utama perikanan - Konflik horizontal nelayan pada <i>fishing ground</i>
Konsumsi Ikan Nasional tahun 2019 sebesar 54,49 kg/kap/thn (Renstra KKP)	Konsumsi Ikan : 49,45 kg/kap/thn	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Gerakan Gemar Makan Ikan (GEMARIN), Sosialisasi, Edukasi, Promosi dan Penyuluhan.	Ketersediaan produksi dan harga	Ketersebaran pulau dan luasnya jangkauan pelayanan masyarakat dimana secara geografis Kab. Kepulauan Selayar terdiri atas gugusan pulau dengan jarak relatif berjauhan

Identifikasi permasalahan terkait dengan peningkatan produksi perikanan dan konsumsi ikan adalah target nasional dalam agenda Nawa Cita yang dijabarkan dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan. Aspek kajian tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi perikanan yang merupakan tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana disajikan pada tabel 2.7 di atas.

Indikator capaian kinerja yang ditargetkan secara nasional terkait produksi perikanan pada tahun 2019 adalah 39,97 juta ton dan konsumsi ikan nasional sebesar 54,49 kg/kap/thn. Sementara kinerja capaian daerah saat ini terhadap aspek peningkatan produksi perikanan pada tahun 2015 sebesar 24.960,73 ton atau 0,06 % sedangkan konsumsi ikan telah mencapai 49,45 kg/kap/thn atau sebesar 90,75 %.

Beberapa identifikasi permasalahan yang mempengaruhi pelayanan SKPD terkait peningkatan produksi perikanan disebabkan antara lain : struktur dan kualitas alat/sarana penangkapan ikan dan pembudidaya yang rendah, rendahnya kualitas SDM dan kelembagaan pelaku utama perikanan, dan konflik horizontal nelayan pada daerah penangkapan. Adapun faktor pendukung yang dapat dilakukan berdasarkan kewenangan SKPD adalah upaya peningkatan kapasitas nelayan/ pembudidaya melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan bantuan sarana perikanan/ pembudidaya serta mengembangkan sarana/prasarana dan fungsi kawasan industri perikanan yang harus diikuti dengan dukungan berbagai kebijakan, perijinan, dan anggaran yang merupakan faktor pendukung yang bersifat eksternal atau di luar kewenangan SKPD.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan menggambarkan layanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yang senantiasa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu perhatian terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan eksternal merupakan tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi pencapaian tujuan dan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar di masa mendatang.

Pembangunan bidang kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya perikanan.

Wilayah laut Kabupaten Kepulauan Selayar meskipun didukung oleh garis pantai sepanjang 670 km, dengan potensi sumberdaya perikanan dan ekosistem pesisir yang lengkap, namun produksi perikanan masih belum optimal. Saat ini produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya masing-

masing baru mencapai 24.155,8 ton dan 804,93 ton. Rendahnya produktivitas perikanan tangkap antara lain disebabkan kepemilikan armada dan alat tangkap nelayan relatif masih sederhana dan bersifat subsistem, serta rendahnya keterampilan nelayan.

Permasalahan utama yang dihadapi terkait dengan masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan oleh struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, serta masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana secara memadai. Infrastruktur pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dalam mendukung pengembangan Kawasan Perikanan Terpadu masih belum dapat optimal. Disamping itu, aspek sangat mendasar yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas adalah kualitas SDM dan kelembagaannya. Saat ini jumlah masyarakat yang bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan sangat besar, namun pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai dan belum merata.

Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan tingginya biaya investasi, terbatasnya jangkauan pemasaran, kualitas produk dan rendahnya keterampilan pembudidaya, terbatasnya ketersediaan pakan dan benih, kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit, penyediaan fasilitas kolam dan air yang baik serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan harga, serta tingginya harga pakan. Rendahnya produktivitas perikanan budidaya juga disebabkan karena struktur pelaku usaha perikanan budidaya masih dalam skala kecil/tradisional dengan keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi dan pasar. Disamping itu serangan penyakit pada rumput laut dan rendahnya harga pada produksi

budidaya ikan keramba, serta pencemaran akibat berbagai faktor termasuk aktifitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu perlu diiringi dengan peningkatan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman untuk konsumsi manusia.

Kesejahteraan pelaku usaha perikanan (budidaya, penangkapan, pengolahan dan pemasaran) merupakan salah satu pilar penting dalam peningkatan daya saing daerah. Namun, kondisi kesejahteraan para nelayan dan pelaku usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dengan pendapatan yang diperolehnya masih sangat terbatas. Permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya perlindungan terhadap pelaku usaha UMK untuk meningkatkan daya saing melalui sinergi lintas sektor (termasuk dalam mengakses sumber pembiayaan), perlindungan terhadap pasar domestik, dan sertifikasi produk.

Dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para nelayan/pembudidaya. Dalam kaitan ini, nelayan/pembudidaya ikan masih mengalami kesulitan mengakses permodalan atau kredit akibat terkendala oleh pemenuhan persyaratan prosedural perbankan.

Permasalahan lainnya yang patut menjadi perhatian adalah pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya serta peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui pembinaan dan pendidikan. Selain itu tingginya praktek “*illegal, unreported, and unregulated*” juga masih merupakan isu yang harus memerlukan perhatian besar seiring berkurangnya kewenangan kabupaten/kota dalam kegiatan pengawasan wilayah laut dengan pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar di masa lima tahun mendatang. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	<p>Masih Rendahnya Produksi Perikanan :</p> <p>a. Perikanan Tangkap</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah tangkapan ikan per unit produksi rendah • Budaya melaut nelayan masih bersifat tradisional, one day fishing dan subsitem. • Lemahnya kelembagaan nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur dan kualitas kepemilikan armada penangkapan ikan yang sederhana dan tradisional. • Inovasi dan penguasaan teknologi penangkapan ikan berjalan sangat lambat. • Rendahnya keterampilan penangkapan ikan oleh nelayan.
	<p>b. Perikanan Budidaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya minat masyarakat dalam kegiatan budidaya • Kurang optimalnya pengelolaan potensi budidaya laut • Lemahnya kelembagaan pembudidaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan teknologi budidaya oleh masyarakat masih sangat rendah. • Belum terjangkaunya investasi dalam kegiatan budidaya yang tinggi (keterbatasan akses informasi dan permodalan, jaringan pasar, dan kestabilan harga). • Ketersediaan dan harga pakan dan bibit masih mahal. • Intensitas serangan hama dan penyakit pada kegiatan budidaya • Kegiatan budidaya masih dalam skala kecil/tradisional

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
2.	Tingginya intensitas transaksi ikan di atas kapal (<i>transshipment</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya minat swasta dalam berinvestasi di sektor perikanan • Belum terintegrasinya sistem/rantai produksi kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir • Minimnya ketersediaan fasilitas pokok, penunjang dan pendukung sektor perikanan terutama pada Tempat pendaratan ikan dan sentra-sentra nelayan. • Dominasi armada penangkapan ikan oleh nelayan luar Selayar 	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya kerjasama dan sinergitas pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan/ pembudidaya, Badan Usaha Lokal, dan Investor perikanan) • Tersebarnya sentra-sentra nelayan sebagai tempat pendaratan ikan • Belum optimalnya pengelolaan TPI dan sentra nelayan sebagai kawasan bisnis perikanan • Terbatasnya anggaran pemerintah daerah dalam menyiapkan fasilitas dan infrastruktur perikanan pada Tempat Pendaratan Ikan dan sentra-sentra nelayan
3.	Lemahnya daya saing produk kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya sinergitas lintas sektor dalam pembinaan dan dukungan terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya akses permodalan dan informasi pasar • Lemahnya kapasitas kelembagaan • Masih lemahnya peran Badan Usaha lokal dalam menjembatani jejaring usaha dan pemasaran

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
4.	Masih tingginya angka kemiskinan masyarakat pelaku utama kelautan dan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya kualitas potensi sumberdaya pesisir dan laut • Lemahnya kapasitas kelembagaan pelaku utama kelautan dan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya intensitas praktek IUU • Belum optimalnya program pemberdayaan dan upaya perlindungan terhadap pelaku utama kelautan dan perikanan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan dan berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural”. Dalam rumusan visi ini terdapat 3 (tiga) pokok visi yakni “masyarakat maritime sejahtera”, “nilai keagamaan” dan “nilai kultural”. “Masyarakat maritim yang sejahtera” adalah perwujudan visi yang hendak dicapai, “nilai keagamaan” dan “nilai kultural” adalah landasan nilai yang dijadikan acuan dalam pencapaian perwujudan visi kesejahteraan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2016 – 2021, merumuskan 7 (tujuh) misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Nilai Keagamaan Sebagai Sumber Inspirasi Dan Basis Nilai Utama Dalam Pembangunan Secara Terencana, Menyeluruh dan Berkelanjutan.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan dan Pariwisata

5. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah
6. Mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta sentra pertumbuhan di sektor agrobisnis dan agromaritim yang berbasis pada ekonomi kerakyatan
7. Mewujudkan Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal Melalui Strategi Kebudayaan

Bertitik tolak dari tujuh (7) misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, terdapat empat (4) misi yang didukung oleh pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

- **Misi ke-2** "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.

Pada pelaksanaan misi ke-2 ini, diarahkan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai, Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, Program Peningkatan Sumberdaya Manusia, Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Capaian Kinerja, serta Program Pengembangan Data/Informasi

- **Misi ke-3** "Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat".

Pada pelaksanaan misi ke-3 ini, diarahkan pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pengembangan Perikanan Budidaya, dan Program pemberdayaan usaha Pembudidaya kecil.

- **Misi ke-4** "Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan dan Pariwisata".

Pada pelaksanaan Misi ke-4 diarahkan pada Program pengembangan Infrastruktur Kelautan dan Perikanan, Program Pengembangan Kawasan

Perikanan Terpadu, dan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut /Air Payau dan Air Tawar.

- **Misi ke-5** "Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah".

Pada pelaksanaan misi ke-5 ini, diarahkan pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pengembangan Perikanan Budidaya, dan Program pemberdayaan usaha Pembudidaya kecil.

Telaahan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sangat berkaitan dengan beberapa misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT MARITIM YANG SEJAHTERA BERBASIS NILAI KEAGAMAAN DAN KULTURAL				
NO.	MISI	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif dan Transparan (misi ke-2)	Sinergitas program antara SKPD/bidang dan antar sector	Rendahnya kualitas SDM Aparatur	- Koordinasi antara SKPD/bidang dalam perencanaan dan pelaksanaan program
2	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat (misi ke-3)	Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam mengakses permodalan dan manajemen untuk meningkatkan skala usaha	- Lemahnya akses perbankan sebagai sumber permodalan - Lemahnya kapasitas kelembagaan - Masih lemahnya peran Badan Usaha lokal dalam menjembatani jejaring usaha dan pemasaran	- Adanya program sertifikasi rumah nelayan sebagai jaminan kredit permodalan usaha kecil/menengah - Adanya BPR Pesisir Tanadoang
3	Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan dan Pariwisata (misi ke-4)	Keterbatasan kewenangan dan kemampuan SKPD untuk menyiapkan infrastruktur dasar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	- Keterjangkauan dan ketersebaran pusat pertumbuhan di sentra perikanan/nelayan - Keterbatasan anggaran - Kurangnya fasilitasi kerjasama pemasaran hasil perikanan	- Kebijakan pemerintah menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu leading sektor - Minat investor perikanan yang tinggi
4	Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah (misi ke-5)	a. Potensi sumberdaya perikanan yang belum dikelola maksimal b. Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan selama ini cenderung eksploitasi tanpa memperhatikan pelestarian sumberdaya	- Terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan - Terbatasnya penguasaan teknologi oleh nelayan dan pembudidaya	- Terbukanya akses informasi melalui media elektronik - Adanya kebijakan di sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu leading sektor

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”. Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan :

1. Produksi perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih rendah
2. Sarana dan Prasarana penangkapan masih sangat rendah
3. Penguasaan teknologi penangkapan dan budidaya oleh masyarakat nelayan dan pembudidaya masih sangat rendah.

Sedangkan faktor pendorong yang dapat mendukung Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

1. Potensi sumberdaya alam laut dan pengembangan budidaya di Kabupaten Kepulauan Selayar masih cukup besar sehingga masih memungkinkan untuk dikelola secara optimal.
2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini fokus pada pengembangan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan.
3. Adanya Pusat Pendaratan Ikan Indonesia (PPI) Bonehalang yang saat ini sedang dalam proses pengembangan.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan DKP Kab. Kep. Selayar berdasarkan Sasaran Renstra KKP beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra KKP	Permasalahan Pelayanan DKP Kab. Kep. Selayar	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB (%)	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur dan kualitas prasarana dan sarana penangkapan ikan • Belum optimalnya pengelolaan TPI sebagai kawasan pengembangan perikanan • Maraknya kegiatan penangkapan ikan secara 	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasarana penangkapan yang digunakan nelayan masih tradisional • Mata pencaharian nelayan bergantung pada SDA laut • Pola budidaya masih 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumberdaya Kelautan memiliki Potensi cukup besar terutama pengembangan budidaya • Potensi Kelembagaan • Dukungan Pembiayaan dan Komitmen Penganggaran oleh Pemerintah Daerah • Kebijakan ekonomi serta
2.	Produksi Perikanan (ton) a. Perikanan Tangkap b. Perikanan Budidaya			
3.	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra KKP	Permasalahan Pelayanan DKP Kab. Kep. Selayar	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
4.	Nilai Tukar Nelayan/ Pembudidaya Ikan	<ul style="list-style-type: none"> • illegal • Rusaknya kelestarian lingkungan akibat illegal fishing • Keterwakilan jumlah perempuan dalam pengembangan SDM usaha perikanan masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • tradisional • Penguasaan teknologi penangkapan dan budidaya sangat lambat • Sarana dan prasarana pendukung TPI masih terbatas • Kesadaran masyarakat dalam berkelompok dan pengawasan dan penegakan hukum masih rendah • Kualitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • ikim sosial politik yang kondusif • Kebijakan K/L dalam membangun dan mengembangkan jaringan program nasional, seperti ; tol laut, Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN), Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), Gerai Maritim, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Perikanan dll
5.	Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Kelautan Perikanan dan Kelompok Masyarakat Pengawas (yang aktif)			

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan yaitu “Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai pilar utama dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan Masyarakat. Visi tersebut merupakan penjabaran dari Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2018 dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan. Dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan dijelaskan makna dari visi tersebut yaitu Pilar Utama Pembangunan Kelautan dan Perikanan

merupakan gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 berkontribusi terhadap perwujudan Ketahanan, Kemandirian, Kedaulatan Pangan, Pertumbuhan ekonomi daerah dan Kontribusi Nasional. Sedangkan Simpul Jejaring merupakan gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan tahun 2013 menempatkan diri sebagai pusat pertumbuhan, pelayanan dan jasa dengan mensinergikan potensi keunggulan kab/kota, kemajuan kabupaten dan kota serta bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional. Dan Akselarasi Kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran tentang proses perubahan pada masyarakat Sulawesi Selatan melalui Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebagai langkah percepatan perwujudan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan mengusung 4 (empat) misi, yaitu :

MISI I : Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Kelautan dan Perikanan

MISI II : Memelihara daya dukung dan kualitas lingkungan sumberdaya Kelautan dan Perikanan

MISI III : Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan

MISI IV : Mengembangkan SDM Kelautan dan Perikanan dan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mendukung visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan, antara lain :

1. Produksi perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih rendah
2. Terbatas ketersediaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan (pokok, penunjang dan pendukung) dan tidak adanya Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang berstandar nasional (SKP)
3. Kepemilikan dan penggunaan sarana dan prasarana penangkapan ikan masih sangat tradisional
4. Penguasaan teknologi penangkapan ikan dan budidaya oleh masyarakat nelayan dan pembudidaya masih sangat rendah.
5. Masih tingginya aktifitas destructive dan illegal fishing
6. Rendahnya kesadaran berkelompok oleh pelaku usaha kelautan dan perikanan

Sedangkan faktor pendorong yang dapat mendukung visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan antara lain:

1. Potensi sumberdaya alam perikanan dan pengembangan budidaya (laut dan perairan umum) di Kabupaten Kepulauan Selayar masih cukup besar sehingga masih memungkinkan untuk dikelola secara optimal.
2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang memprioritaskan pengembangan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan.
3. Kebijakan dan komitmen Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan baik dalam penganggaran maupun dalam implementasi program pengembangan kelautan dan perikanan terutama dalam mewujudkan visi dan misi.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan DKP Kab. Kep. Selayar berdasarkan Sasaran Renstra DKP Propinsi Sulawesi Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DKP Propinsi SulSel	Permasalahan Pelayanan DKP Kab. Kep. Selayar	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya produksi dan produktivitas Perikanan ; a. Perikanan Tangkap b. Perikanan Budidaya c. Nilai Produksi Perikanan d. Nilai Tukar Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan dan struktur sarana dan prasarana penangkapan ikan masih sangat tradisional • Terbatas ketersediaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan (pokok, penunjang dan pendukung) dan tidak adanya Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang berstandar nasional (SKP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasarana penangkapan yang digunakan nelayan masih tradisional • Mata pencaharian nelayan bergantung pada SDA laut • Pola budidaya masih tradisional • Penguasaan teknologi penangkapan dan budidaya sangat lambat • Sarana dan prasarana pendukung TPI masih terbatas • Kesadaran masyarakat dalam berkelompok dan pengawasan dan penegakan hukum masih rendah • Kualitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumberdaya Kelautan memiliki Potensi cukup besar terutama pengembangan budidaya • Potensi Kelembagaan • Dukungan Pembiayaan dan Komitmen Penganggaran • Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang memprioritaskan pengembangan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. • Kebijakan dan komitmen Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan baik dalam penganggaran maupun dalam implementasi program pengembangan kelautan dan perikanan terutama dalam mewujudkan visi dan misi.
2.	Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar masyarakat pesisir dan pulau2 kecil. a. Volume produksi garam rakyat (ton) b. Jumlah Pulau- Pulau Kecil yang ekonomi masyarakatnya dibina dan diberdayakan serta mendapatkan layanan infrastruktur (pulau)	<ul style="list-style-type: none"> • Maraknya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal • Penguasaan teknologi penangkapan ikan dan budidaya oleh masyarakat nelayan dan pembudidaya masih sangat rendah. • Rendahnya kesadaran berkelompok oleh pelaku usaha kelautan dan perikanan 		
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumberdaya kelautan dan perikanan			
4.	Terjaganya iklim investasi berkualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar Jawa			
5.	Meningkatnya keterampilan dan inovasi pelaku usaha kelautan dan Perikanan			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar. Dibandingkan dengan struktur dan pola eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun mendatang. Sehingga rancangan program beserta targetnya dapat disusun sesuai dengan RTRW tersebut. Struktur tata ruang menentukan kualitas interkoneksi antar simpul-simpul wilayah dalam kawasan, sekaligus merupakan suatu komunitas yang utuh yang memungkinkan sebuah kawasan berartikulasi secara optimal terhadap dinamika lingkungan eksternalnya. Untuk mengintegrasikan titik-titik ruang, maka dibuat struktur ruang berdasarkan fungsinya masing-masing.

Tujuan umum penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk menata ruang wilayah Kepulauan Selayar dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritim serta untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan

dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

Tujuan khusus penataan ruang wilayah kabupaten adalah :

- a. mengembangkan fungsi Kepulauan Selayar sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan konvensi;
- b. mengarahkan peran Kepulauan Selayar sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Kepulauan Selayar, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
- c. mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
- d. memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut, dan udara, serta terpadu antara wilayah;
- e. meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan Provinsi, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;
- f. secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, serta lebih terlayani sistem transportasi,

informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;

- g. menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar seperti penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis Kabupaten, penyusunan RPJMD Kabupaten;
- h. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat;
- i. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- j. menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban.

Dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, dikemukakan bahwa, kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

- a. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;
- b. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;
- c. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana;
- d. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Laut Takabonerate, hutan lindung, kawasan lindung, cagar alam laut dan lain-lain;
- e. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah;

- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- g. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
- i. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata;
- j. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional; dan
- k. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional.
- l. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal SDM untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten.

Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat potensial dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Berbagai potensi tersebut seperti perikanan, pariwisata, jasa kelautan, transportasi, dan industri pesisir. Mengingat potensi yang besar tersebut, maka dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu (Integrated Coastal Management) berbasis kawasan dengan melibatkan semua stakeholder terkait.

Selanjutnya, berdasarkan potensi daerah dan posisi geografis, salah satu agenda strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka pengembangan wilayah dan peningkatan peran ekonomi daerah terhadap regional dan nasional, adalah Pengembangan Industri Perikanan Terpadu yang direncanakan

berlokasi di Pattumbukang Kecamatan Bontosikuyu tepatnya di ujung Selatan Pulau Selayar.

Pengembangan kawasan Industri Perikanan Terpadu diharapkan dapat berfungsi sebagai katalisator dalam mempercepat transaksi ekonomi di sektor kelautan dan perikanan sekaligus dapat mengintegrasikan dengan program K/L diantaranya Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) dan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) mendukung salah satu visi pemerintah dalam kedaulatan pangan.

Keterkaitannya dengan pengalokasian ruang, dalam pelaksanaan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional, pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengembangkan strategi yang terdiri atas :

- a. Mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng,
- b. Mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan, dan
- c. Mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.

Sedangkan strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal SDM untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten, maka pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengembangkan strategi yang terdiri atas :

- a. Meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau di wilayah Kabupaten Selayar dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;

- b. Mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir;
- c. Meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;
- d. Meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang didukung oleh akses transportasi yang memadai;
- e. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;
- f. Meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;
- g. Meningkatkan penyediaan akses transportasi dari Pulau-Pulau tetangga dan dari Pulau-Pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan;
- h. Meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan keadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Potensi sumber daya pesisir tersebut telah mengalami degradasi ekosistem terutama populasi ikan dan biota lainnya yang cukup terdapat didalamnya sebagai akibat dari dampak laju pertumbuhan penduduk, kegiatan pembangunan fisik, peningkatan sampah organik dan anorganik

serta kegiatan-kegiatan ilegal dalam industri perikanan, pertambangan, dan pembalakan.

Peningkatan konsumsi dan pemanfaatan sumberdaya pesisir yang berlebihan, tanpa mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungannya, akan semakin menurunkan daya lingkungan dan nilai serta keberadaan potensi sumberdaya pesisir, sehingga mengancam potensi ekonomi dan sosial budaya yang terkandung didalamnya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan, karena sebagian masyarakat lokal yang berdomisili di wilayah pesisir di Kepulauan Selayar yang bermatapencaharian sebagai nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya pesisir, khususnya kegiatan perikanan sebagai sumber pendapatan utamanya.

Degradasi sumberdaya pesisir dan laut yang terjadi saat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang berdampak terhadap lingkungan hidup strategis adalah :

1. Degradasi ekosistem terumbu karang dan mangrove di wilayah pesisir, baik yang terjadi secara alamiah maupun akibat aktifitas pembangunan yang bersifat destruktif.
2. Kerusakan sumberdaya laut dan pesisir akibat penambangan dan penangkapan ikan dengan cara yang merusak, seperti bom, jaring trawl, dan bius serta penangkapan yang berlebih.
3. Pencemaran laut akibat buangan limbah baik yang bersifat cair maupun padat yang bermuara pada laut.
4. Abrasi dan intrusi alir laut akibat anomali iklim.

Sedangkan faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi perubahan lingkungan hidup strategis di wilayah pesisir adalah :

1. Program Peningkatan Produksi Perikanan dan Kelautan dengan beragam cara penangkapan ikan yang masih bersifat *destruktif* dan *illegal* serta penggunaan alat bantu penangkapan ikan yang merusak seperti konpressor yang berpotensi memiliki dampak terhadap kerusakan lingkungan ekosistem laut dan pencemaran lingkungan. Begitu pula dengan meningkatnya produksi perikanan juga akan berpotensi meningkatkan pencemaran lingkungan berupa volume sampah dari proses pengolahan hasil perikanan.
2. Program peningkatan dukungan terhadap industri perikanan terpadu berpotensi memiliki dampak terhadap peningkatan volume produksi limbah cair dan limbah padat dari proses produksi dan limbah domestik dalam kawasan industri perikanan yang berpotensi mencemari air laut, tanah, dan daerah aliran sungai.

Tabel 3.5

Perumusan Mitigasi, Alternatif, dan Rekomendasi Perkiraan Dampak Pembangunan Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar

NO.	INDIKASI PROGRAM PRIORITAS	DAMPAK	RUMUSAN MITIGASI DAN ALTERNATIF		REKOMENDASI
			MITIGASI	ALTERNATIF	
1.	Program Peningkatan Produksi Perikanan dan Kelautan	Berpotensi merusak ekosistem laut bila menggunakan bom, bius, trawl, dan kompressor.	Mengurangi penggunaan bom, bius, trawl, dan kompressor dalam penangkapan ikan, mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku pengrusakan		Diperlukan penyuluhan kepada masyarakat pelaku utama perikanan terkait dampak dari penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan
		Berpotensi meningkatkan volume sampah dari hasil penjualan dan pengelolaan produk perikanan	Pembangunan instalasi IPAL dan Tempat Penyimoanan Sampah pada area penjualan dan pengolahan produk perikanan		Pemda perlu membangun tempat pelelangan ikan yang memadai dan tertata baik dari kondisi lingkungan
2.	Program Peningkatan Dukungan Terhadap Industri Perikanan Terpadu	Pengembangan Sentra Industri Pengolahan hasil perikanan berpotensi menghasilkan limbah cair dan padat sehingga berpotensi mencemari air laut dan muara sungai	Pada kawasan yang akan dikembangkan menjadi industry perikanan terpadu harus disertai dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehingga dapat diolah dan digunakan kembali (<i>reuse</i>)	Program perencanaan dan peningkatan dukungan industri perikanan terpadu	Program pengembangan kawasan industry yang ramah lingkungan dan memperhatikan fungsi kawasan
			Apabila kawasan sentra industri yang dikembangkan merupakan sentra industry rumah tangga yang berada dalam kawasan pemukiman, maka industry rumah tangga tersebut harus dilengkapi dokumen lingkungan dan wajib melakukan pengelolaan lingkungan seperti pembuatan IPAL		Diperlukan perencanaan pengembangan industry perikanan Berbasis Kawasan serta pengembangan sentra-sentra nelayan

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2016 – 2021, diperkirakan akan menghadapi beberapa isu-isu strategis antara lain :

1. Masih tingginya kemiskinan di wilayah pesisir;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan (penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan);
3. Rendahnya kemandirian, kualitas SDM dan kelembagaan pelaku utama perikanan (penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil);
4. Rendahnya produksi dan produktifitas perikanan;
5. Kurangnya data dan informasi kelautan dan perikanan;
6. Pengembangan dan optimalisasi sarana/prasarana serta fungsi kawasan industri perikanan;
7. Rendahnya kerjasama lintas SKPD terhadap pengelolaan dan pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta jasa kelautan lainnya;
8. Tingkat kerusakan dan degradasi sumberdaya laut dan ekosistem pesisir;
9. Koordinasi pengawasan dan penegakan hukum;
10. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan/evaluasi pemanfaatan wilayah pesisir dan laut;
11. Pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil belum Optimal;
12. Terbatasnya ragam dan diversifikasi produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah;
13. Terbatasnya promosi dan kerjasama usaha dan pemasaran hasil perikanan;
14. Terbatasnya jaringan distribusi dan konektivitas hulu-hilir hasil perikanan;
15. Terbatasnya jumlah Unit Pasca Panen dan Pasar Ikan yang memenuhi standar;

16. Terbatasnya wilayah pengembangan pasca panen hasil perikanan yang berbasis kawasan dan terpadu dengan stakeholder terkait lainnya.

Skor Kriteria, Nilai Skala Kriteria, dan Rata-rata Skor Kriteria terkait penentuan isu-isu strategis yang mempengaruhi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	15
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	25
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	25
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
	Jumlah	100

Tabel 3.7
Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria Ke-					Total Skor
		1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Masih tingginya kemiskinan di wilayah pesisir	4	4	4	3	4	19
2.	Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan (penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan)	3	4	3	3	4	17
3.	Rendahnya kemandirian, kualitas SDM dan kelembagaan pelaku utama perikanan (penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil)	4	4	4	4	3	19
4.	Rendahnya produksi dan produktifitas perikanan	4	3	3	4	4	18
5.	Kurangnya data dan informasi kelautan dan perikanan	3	3	4	3	4	17
6.	Pengembangan dan optimalisasi sarana/prasarana serta fungsi kawasan industri perikanan	4	3	3	4	4	18
7.	Rendahnya kerjasama lintas SKPD terhadap pengelolaan dan pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta jasa kelautan lainnya	4	4	4	3	3	18
8.	Tingkat kerusakan dan degradasi sumberdaya laut dan pesisir	3	2	3	3	3	14
9.	Koordinasi pengawasan dan penegakan hukum	3	3	2	2	3	13
10.	Partisipasi aktif masyarakat dalam	2	4	3	4	4	17

	perencanaan, pengelolaan dan pengawasan/evaluasi pemanfaatan wilayah pesisir dan laut						
11.	Pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil belum Optimal	4	3	3	4	3	17
12.	Terbatasnya ragam dan diversifikasi produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah	2	3	3	2	3	14
13.	Terbatasnya promosi dan kerjasama usaha dan pemasaran hasil perikanan	3	3	3	2	3	14
14.	Terbatasnya jaringan distribusi dan konektivitas hulu-hilir hasil perikanan	3	4	3	3	3	16
15.	Terbatasnya jumlah Unit Pasca Panen dan Pasar Ikan yang memenuhi standar	2	3	3	3	2	13
16.	Terbatasnya wilayah pengembangan pasca panen hasil perikanan yang berbasis kawasan dan terpadu dengan stakeholder terkait lainnya	3	3	3	3	2	14

Keterangan :

Penentuan Skala Kriteria berdasarkan Likert :

0 - 1 : Rendah

>1 - 2 : Sedang

>2 - 3 : Cukup

>3 - 4 : Tinggi

Dengan $n = 5$, maka didapatkan Rata-rata Skor Kriteria Isu Strategis sebagaimana terlihat pada table berikut ini.

Tabel 3.8
Rata-rata Skor Kriteria Isu-Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih tingginya kemiskinan di wilayah pesisir khususnya nelayan	19	3,8
2.	Rendahnya kemandirian, kualitas SDM dan kelembagaan pelaku utama perikanan (penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil)	19	3,8
3.	Rendahnya produksi dan produktifitas perikanan	18	3,6
4.	Pengembangan dan optimalisasi sarana/prasarana serta fungsi kawasan industri perikanan	18	3,6
5.	Rendahnya kerjasama lintas SKPD terhadap pengelolaan dan pemanfaatan potensi wilayah pesisir	18	3,6

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
	dan pulau-pulau kecil serta jasa kelautan lainnya		
6.	Terbatasnya sarana dan prasarana perikanan (penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan)	17	3,4
7.	Kurangnya data dan informasi kelautan dan perikanan	17	3,4
8.	Pengembangan mata pencaharian alternatif masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil belum Optimal	17	3,4
9.	Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan/evaluasi pemanfaatan wilayah pesisir dan laut	17	3,4
10.	Terbatasnya jaringan distribusi dan konektivitas hulu-hilir hasil perikanan	16	3,2
11.	Tingkat kerusakan dan degradasi sumberdaya laut dan pesisir	14	2,8
12.	Terbatasnya ragam dan diversifikasi produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah	14	2,8
13.	Terbatasnya promosi dan kerjasama usaha dan pemasaran hasil perikanan	14	2,8
14.	Terbatasnya wilayah pengembangan pasca panen hasil perikanan yang berbasis kawasan dan terpadu dengan stakeholder terkait lainnya	14	2,8
15.	Koordinasi pengawasan dan penegakan hukum	13	2,6
16.	Terbatasnya jumlah Unit Pasca Panen dan Pasar Ikan yang memenuhi standar	13	2,6

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar periode lima tahun ke depan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021, yaitu

“Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural”.

Dalam rumusan visi ini terdapat 3 (tiga) pokok visi yakni masyarakat maritim sejahtera, nilai keagamaan, dan nilai kultural. “Masyarakat maritim yang sejahtera” adalah perwujudan visi yang hendak dicapai, sedangkan nilai keagamaan dan nilai kultural adalah landasan nilai yang dijadikan acuan dalam pencapaian perwujudan visi kesejahteraan.

“Masyarakat maritim yang sejahtera” mengandung dua pengertian kondisi, yakni masyarakat Selayar sebagai masyarakat maritime dan masyarakat Selayar sebagai masyarakat yang sejahtera. Dalam pokok visi ini tercakup berbagai fokus terkait kesejahteraan masyarakat dilihat dari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor serta kesejahteraan sosial, keterpenuhan berbagai infrastruktur wilayah, hasil-hasil pengelolaan sumberdaya alam yang unggul, serta produktivitas dan daya saing daerah.

“Berbasis nilai keagamaan” mengandung pengertian bahwa masyarakat Selayar dalam lima tahun kedepan akan semakin mewujudkan kehidupan beragama yang berkualitas dan rukun serta menempatkan nilai keagamaan sebagai sumber inspirasi dan motivasi serta basis nilai utama dalam kehidupan.

“Berbasis nilai kultural” mengandung pengertian bahwa dalam lima tahun kedepan kebudayaan daerah akan semakin berkembang dalam merespon dinamika kebudayaan nasional dan global. Dalam pokok visi ini tradisi dan kearifan lokal ditempatkan sebagai unsur yang akan terlestarikan secara dinamis.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021, merumuskan 7 (tujuh) misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Nilai Keagamaan Sebagai Sumber Inspirasi dan Basis Nilai Utama Dalam Pembangunan Secara Terencana, Menyeluruh dan Berkelanjutan.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif dan Transparan.
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat
4. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan dan Pariwisata
5. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah
6. Mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta sentra pertumbuhan di sektor agrobisnis dan agromaritim yang berbasis pada ekonomi kerakyatan
7. Mewujudkan Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal Melalui Strategi Kebudayaan

Adapun Tujuan dan Sasaran dari penjabaran dari Visi Misi tersebut yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yang termuat RPJMD Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

1. Misi ke-2 (kedua) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif dan Transparan. Tujuan misi ini adalah *"memperkuat struktur dan budaya organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (T-2)"* Adapun sasaran yang ingin diwujudkan adalah *"meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien (S-3)"*.
2. Misi ke-3 (ketiga) yaitu *"Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat"* dengan tujuan adalah *"Meningkatkan derajat kesejahteraan"*

masyarakat (T-6)”. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan adalah “*Berkurangnya penduduk miskin (S-8) dan Meningkatnya daya beli masyarakat (S-9)*”.

3. Misi ke-4 (keempat) yaitu “Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan dan Pariwisata” dengan tujuan “*Meningkatkan daya saing dan investasi daerah (T-12)*”. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan adalah “*Meningkatnya investasi (S-19)*”.
4. Misi ke-5 (kelima) yaitu Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah dengan tujuan “*Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman (T-13)*”. Adapun sasaran yang hendak diwujudkan dari pernyataan tujuan tersebut adalah, yaitu : 1. Terbangun dan berkembangnya kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang (S-21), dan Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan (S-23).

Berdasarkan keterkaitan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan pernyataan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang dijabarkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021, maka dirumuskan Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PADA TAHUN KE...					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI II : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BAIK MELALUI PENDEKATAN ASPIRATIF, PARTISIPATIF, DAN TRANSPARAN									
1	Memperkuat struktur dan budaya organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (T-2)	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel (S-3)	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	CC	B	BB	BB	BB	BB
			Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
MISI III : MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT									
2	Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan (T-6)	Menurunnya angka kemiskinan pada rumah tangga masy. pelaku usaha kelautan dan perikanan (S-8)	Berkurangnya jumlah Rumah Tangga Miskin pelaku usaha kelautan dan perikanan (Jumlah dan % KK)	8,615	8,015	7,415	6,815	6,165	5,415
				6.69	6.23	5.76	5.29	4.79	4.24
		Meningkatnya daya beli masyarakat (S-9)	Income per Kapita Penduduk (juta)	22.5	24	25,5	27	28.5	30

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PADA TAHUN KE...					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI IV : MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN INVESTASI SWASTA DI SEKTOR PERIKANAN, KELAUTAN, DAN PARIWISATA									
3	Meningkatkan daya saing dan investasi daerah (T-12)	Meningkatnya investasi (S-19)	Nilai PMDN (dalam Milyar Rupiah)	38,662,070,000	42,528,277,500	46,781,105,000	51,459,215,500	56,605,136,000	62,265,649,500
MISI V : MEWUJUDKAN PENGELOLAAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM SESUAI KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KOMPETITIF DAERAH									
4	Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman (T-13)	Terbangun dan berkembangnya kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang (S-21)	Realisasi pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (%)	40	45	50	55	60	65

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PADA TAHUN KE...					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI V : MEWUJUDKAN PENGELOLAAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM SESUAI KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KOMPETITIF DAERAH									
	Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman (T-13)	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan (S-23)	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	26.598,7 7	28.992, 66	31.312,07	33.503,9 2	35.179,1 2	36.938.08
Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Ton)			829,08	853,95	879,57	905,96	933,14	961,13	
Jumlah Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)			120	123	126	130	132	135	
Konsumsi Ikan (Kg/Org/Tahun)			50,5	51,0	51,5	52,0	52,5	53,0	
Cakupan bina kelompok nelayan			165	170	175	180	185	190	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang disusun Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diurai di atas. Strategi dan kebijakan harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Olehnya itu strategi dan kebijakan DKP Kepulauan Selayar menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja (outcome) sesuai tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dalam menetapkan rumusan strategi dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan, maka dilakukan koordinasi dengan setiap bidang dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yang terurai sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

<i>VISI : Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural</i>			
MISI II : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BAIK MELALUI PENDEKATAN ASPIRATIF, PARTISIPATIF, DAN TRANSPARAN			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Memperkuat struktur dan budaya organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (T-2)	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien (S-3)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah - Meningkatkan kualitas koordinasi penyelenggaraan program lintas sector - Meningkatkan kualitas manajemen Aparatur Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya penerapan <i>punishment</i> dan <i>reward</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah - Peningkatan kinerja penyelenggaraan program pembangunan daerah - Peningkatan status pendidikan formal aparat - Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis <i>merit system</i>
MISI III : MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat (T-6)	Berkurangnya penduduk miskin (S-8)	Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber-sumber ekonomi	Pembinaan dan peningkatan keberdayaan penduduk miskin
	Meningkatnya daya beli masyarakat (S-9)	Meningkatkan daya beli masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan income perkapita - Pengendalian harga - Perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan per kapita

MISI IV : MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN INVESTASI SWASTA DI SEKTOR PERIKANAN, KELAUTAN, DAN PARIWISATA			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan daya saing dan investasi daerah (T-12)	Meningkatnya investasi (S-19)	Meningkatkan minat dan daya tarik investasi	Peningkatan promosi, pemberian kemudahan berinvestasi dan jaminan kepastian hukum bagi investor
MISI V : MEWUJUDKAN PENGELOLAAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM SESUAI KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KOMPETITIF DAERAH			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman (T-13)	Terbangun dan berkembangnya kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang (S-21)	Menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berperan dalam pengembangan kawasan regional secara terpadu	Peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan industry perikanan terpadu
	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan (S-23)	Membangun sentra pengembangan komoditas perikanan dan kelautan	Penguatan kelembagaan nelayan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Strategi dan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2016-2021 yang telah diuraikan tersebut, akan diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan lima tahun ke depan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi, penataan kepegawaian dan administrasi keuangan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKP Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- f. Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai
- g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- h. Penunjang Operasional DAK Perikanan
- i. Penunjang Operasional Penyediaan Dokumen Kontrak dan Pencairan

2. Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, dengan kegiatan :

- a. Pendidikan dan pelatihan Aparatur
- b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Kelautan dan Perikanan
- c. Penyusunan Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan
- d. Studi Banding Pengelolaan Perikanan dan Sentra Nelayan
- e. Bimbingan Teknis Petugas Statistik Perikanan

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan Sarana/Peralatan Kantor
 - c. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 - e. Pembangunan Kantor UPT
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - g. Penunjang operasional kapal perikanan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - b. Pelaporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
 - c. Penyusunan LAKIP
 - d. Penyusunan Renja dan Renstra OPD
 - e. Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut
 - f. Penyusunan LKPJ
 - g. Penyusunan RKA/DPA Pokok dan Perubahan
 - h. Sinkronisasi program dan kegiatan
5. Program Pengembangan Data dan Informasi, dengan prioritas kegiatan :
 - a. Penyusunan/pengembangan DataBase Kelautan dan Perikanan
 - b. Pameran Perikanan
 - c. Statistik Perikanan
 - d. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
 - e. Profil Pembangunan Kelautan dan Perikanan
 - f. Pengembangan Data dan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan
 - g. Pendampingan Validasi Satu Data KKP

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, dengan prioritas kegiatan :
 - a. Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Pembudidaya, KUGAR, dan Poklahsar
 - b. Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Usaha Nelayan Kecil
 - c. Studi Wawasan Kelompok Pembudidaya Ikan dan Perikanan Tangkap (KUB)
 - d. Peningkatan Investasi dan perluasan usaha pasca panen
 - f. Pendampingan Usaha Kelompok Pembudidaya
 - g. Temu Lapang Usaha Budidaya
 - h. Temu Lapang Usaha Perikanan Tangkap
 - i. Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya
 - j. Pembinaan Kelembagaan Pokdakan, KUGAR, dan Poklahsar
 - k. Pelatihan Teknis Penangkapan Ikan dan Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan
 - l. Pelatihan Kewirausahaan Nelayan Kecil dan KUB
 - m. Magang Kerja untuk nelayan
 - n. Pendampingan Kegiatan Pusat dan Propinsi (PUMP, Asuransi Nelayan, Sertifikasi Tanah Nelayan, dll)
 - o. Pembinaan/Pemberdayaan/Penguatan Kelompok Perempuan Pembudidaya dan Kelompok Usaha Bersama (KUB)
 - p. Workshop/Pertemuan/Temu Bisnis pengembangan Perikanan Tangkap
 - r. Studi Banding/Wawasan nelayan dan pengelolaan perikanan.
 - j. Pembinaan Kelembagaan POKMASWAS
7. Program Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT), dengan prioritas kegiatan antara lain :
 - a. Penyediaan Dokumen KIPT
 - b. Dukungan koordinasi KIPT

- c. Pembangunan infrastruktur pada lokasi terpilih KIPT
 - d. Studi wawasan pengelolaan industri perikanan Berbasis Kawasan
 - e. Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Pengelolaan KIPT
 - f. Pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana TPI dan sentra nelayan.
 - g. Pengadaan kendaraan operasional petugas pendata SIUP,TPUPI dan TPI
 - h. Pengadaan alat pengolah data
 - i. Pembangunan TPI Mini dan Pengembangan Sentra Nelayan
 - j. Penunjang operasional bidang pengelolaan TPI dan SIUP budidaya
 - k. Pembangunan infrastruktur pada sentra KIPT dan Sentra Nelayan
 - l. Pelatihan aplikasi GIS dan drone
 - m. Pengadaan Laboratorium Mini
 - n. Pengadaan/Pemeliharaan rutin/berkala Infrastruktur Perikanan (pabrik es/cold storage, dll)
 - o. Studi wawasan Pengelolaan kegiatan SIUP, TPUPI, TPKPIH, TPI dan Sentra Nelayan
 - p. Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan LPSP/LKM/Pokmaswas
8. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan, dengan prioritas kegiatan :
- a. Promosi dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan.
 - b. Bimbingan Teknis Pengembangan Budidaya
 - c. Bimtek Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
 - d. Pengembangan Produk dan Usaha Pasca Panen Pembudidaya
 - f. Lomba Masak Serba Ikan
 - g. Festival Kuliner
 - h. Sosialisasi/Kampanye Gemar Makan Ikan
 - i. Pengadaan sarana/prasarana produksi olahan kelautan dan perikanan

09. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, dengan prioritas kegiatan :
- a. Pengadaan Alat Tangkap Penangkapan Ikan
 - b. Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan
 - c. Pengadaan Sarana Penangkapan
 - d. Bimbingan Teknis Penangkapan Ikan
 - e. Pameran Expo Perikanan Tangkap
 - f. Penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha nelayan kecil
 - g. Enumerator Perikanan Tangkap
10. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, dengan prioritas kegiatan :
- a. Pengembangan Budidaya Laut
 - b. Pengembangan Budidaya Air Payau
 - c. Pengembangan Budidaya Air Tawar
 - d. Pengembangan SDM Pembudidaya
 - e. Dukungan Manajemen Perikanan Budidaya
 - g. Bimbingan Teknis Pengembangan Budidaya
 - h. Pengadaan Pakan dan Bibit
 - i. Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Tambak (PITAP)
 - j. Penanganan Hama dan Penyakit
 - k. Pemetaan Potensi Budidaya Berbasis GIS
 - l. Pembangunan Instalasi Sterilisasi Air Laut Perbenihan.
 - n. Pengadaan Pakan Ultradiet larva
 - o. Peningkatan kapasitas SDM Pengelola BBI
 - p. Pengadaan kendaraan Operasional petugas Hatchery Baloiya/BBI
 - q. Rehabilitasi bak larva
 - r. Rehabilitasi bak Tandon Air laut
 - s. Penunjang operasional BBI Baloiya
 - t. Pengelolaan pemeliharaan Pentokolan udang

- u. Pengelolaan pemeliharaan Pakan alami
- v. Pengadaan peralatan perbenihan

Penjabaran setiap program, kegiatan, dan pendanaan indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan dalam table 6.1

TABEL

6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif

TABEL

6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk menjabarkan kebijakan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar akan melaksanakan 4 (empat) dari 7 (tujuh) misi yang ditetapkan, yakni :

1. Misi ke-2 (Kedua) RPJMD yaitu *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan”*.

Adapun salah satu tujuan dari misi tersebut adalah *“Memperkuat struktur dan budaya organisasi serta profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (T-2)”* Sementara sasaran yang ingin dituju adalah *“meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien (S-3)”*.

Keterkaitan tujuan dan sasaran dari Misi ke-1 RPJMD tersebut pada pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, dijabarkan pada tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (T-1) dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu : 1. Terwujudnya Kelembagaan dan Tatalaksana Organisasi Perangkat Daerah Yang Kuat dan Transparan (S-1), 2. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Yang Transparan Dan Akuntabel (S-2), dan 3. Terwujudnya Perencanaan Dan Pengendalian Kegiatan Yang Berkualitas (S-3).

Tujuan dan sasaran tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui Program:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Pengembangan Data dan Informasi

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,

Adapun indikator kinerja pada masing-masing program tersebut adalah : 1. Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Disiplin Aparatur (%), 2. Prosentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan (%), 3. Jumlah pembinaan dan pelayanan peralatan kantor, pengelola keuangan dan administrasi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan, 4. Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi program kegiatan tepat waktu (Renja, RKA, DPA, SOP, KAK, LAKIP, LPPD dll), 5. Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Kelautan dan Perikanan dan Transparan (%).

2. Misi ke-3 (ketiga) dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu *“Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat”*

Adapun salah satu tujuan dari misi ketiga tersebut adalah *“Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat (T-6)”*. Sementara sasaran yang ingin diwujudkan adalah *“Berkurangnya penduduk miskin (S-8) dan Meningkatnya daya beli masyarakat (S-9)”*.

Keterkaitan tujuan dan sasaran dari Misi ke-3 dalam RPJMD tersebut pada pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, dijabarkan pada tujuan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan (T-2) dengan 2 (dua) sasaran, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (S-4).

Tujuan dan Sasaran pembangunan tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dengan target capaian dapat diukur melalui indikator, yaitu : 1. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB (Rp. Juta), dan 2. Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTN/P).

3. Misi ke-4 (keempat) RPJMD yaitu *“Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan dan Pariwisata”*

Tujuan dari misi ketiga tersebut adalah *“Meningkatkan daya saing dan investasi daerah (T-12)”*. Sementara sasaran yang ingin diwujudkan adalah *“Meningkatnya investasi (S-19)”*.

Keterkaitan tujuan dan sasaran dari Misi ke-4 dalam RPJMD tersebut pada pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, dijabarkan pada tujuan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Kemaritiman (T-3), dengan sasaran yaitu Terbangun dan Berkembangnya Kawasan Industri Perikanan Terpadu (S-5).

Tujuan dan Sasaran Renstra tersebut ingin diwujudkan melalui Program Pembangunan Kawasan Industri Perikanan dengan indikator capaian program persentase realisasi pembangunan Sentra Kawasan Industri Perikanan Terpadu.

4. Misi ke-5 (kelima) RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu *“Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah”*.

Tujuan dari misi ke-5 (kelima) RPJMD tersebut yang berkaitan dengan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah *“Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman (T-13)”* dengan 2 (dua) sasaran yang ingin diwujudkan, yaitu : 1. Terbangun dan berkembangnya kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang (S-21), dan 2. Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan (S-23).

Keterkaitan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut, dijabarkan pada tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan pada tujuan "Meningkatkan Produktivitas Kelautan dan Perikanan (T-4)". Selanjutnya dijabarkan dengan sasaran pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan, yaitu Meningkatnya Produksi Kelautan dan Perikanan (S-6).

Tujuan dan Sasaran Renstra tersebut ingin diwujudkan melalui 3 (tiga) program dengan indikator masing-masing program, yaitu : 1. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan dengan indikator capaian kinerja yaitu Jumlah Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton) dan Konsumsi Ikan (Kg/Org/ Tahun); 2. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dengan indikator capaian kinerja yaitu Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Ton); dan 3. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dengan indikator capaian kinerja yaitu Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan meningkatnya ketersediaan jumlah Benih/ Tokolan Udang di BBI (ekor).

Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD diuraikan dalam tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	C	CC	B	BB	BB	BB	BB
1.a	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	≤ 40	≤ 40	≤ 40	40 - 50	50 - 55	55 - 60	65-70
2	Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Jumlah Penduduk Miskin (KK)	9,215	8,615	8,015	7,415	6,815	6,165	5,415
3.a	Berkurangnya jumlah Rumah Tangga Miskin pelaku usaha kelautan dan perikanan (KK)	2.962	2.769	2.576	2.383	2.190	1.981	1.740
4	Income per Kapita Penduduk (juta)	19	22.5	24	25,5	27	28.5	30
4.a	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya	na	Na	na	na	≥ 100	≥ 102	≥ 103

5,	Nilai PMDN (dalam Milyar Rupiah)	35,147,336,660	38,662,070,000	42,528,277,500	46,781,105,000	51,459,215,500	56,605,136,000	62,265,649,500
	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB (Rp. Juta)	1.038.820,07	1.049.208,3	1.064.946,4	1.080.920,6	1.097.134,4	1.113.591,4	1.130.295,3
6	Realisasi pembangunan Sentra Kawasan Industri Perikanan Terpadu (%)	na	Na	na	10	25	40	65
	Jumlah TPI dan Sentra Nelayan yang memiliki ketersediaan infrastruktur dasar perikanan	1	1	1	2	3	4	5
7	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	24.155,8	26.598,77	28.992,66	31.312,07	33.503,92	35.179,12	36.938.08
8	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	804,93	829,08	853,95	879,57	905,96	933,14	961,13
9	Konsumsi Ikan (Kg/Org/Tahun)	49,45	50,5	51,0	51,5	52,0	52,5	53,0
10	Produksi olahan hasil perikanan (Ton)	117	120	123	126	130	132	135
11	Cakupan bina kelompok nelayan	160	165	170	175	180	185	190
	Jumlah Benih/Tokolan Udang di BBI (ekor)	na	Na	na	80.000	160.000	192.000	432.000

BAB VIII

PENUTUP

Revisi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2016-2021 ini disusun berdasarkan perubahan lingkungan strategis dan pergeseran kebijakan dengan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar periode tahun 2016 – 2021. Renstra ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar ke depan hingga tahun 2021 dalam upaya mengembangkan sektor kelautan dan perikanan sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan yang diembannya. Renstra ini juga merupakan dasar monitoring dan evaluasi pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan.

Mungkin dalam revisi Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan, terutama kedalaman analisa terkait dinamika eksternal dan internal yang berkembang akibat minimnya ketersediaan data dan informasi. Sehingga diharapkan penguatan teamwork dan peningkatan kinerja secara professional di lingkungan organisasi dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan. Dalam implementasinya sebagaimana maksud dan tujuan penyusunan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar yang dapat menentukan suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang telah direncanakan.

Akhir kata semoga Revisi Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016-2021 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan - tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam

rangka mendukung terwujudnya pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Benteng, 21 Januari 2018

KEPALA DINAS

Ir. MAKKAWARU

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. : 19630120 198910 1 003

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program OPD Dan Kegiatan OPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2017		2018		2019		2020		2021		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
						(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Memperkuat Struktur dan Budaya Organisasi serta Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (T-2)	Meningkatnya Kualitas Pemerintah Daerah yang bersih dan Akuntabel(S-2)	Opini Atas LKPD	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen perencanaan dan Laporan evaluasi OPD yang tepat waktu (Renja, RKA, DPA, SOP, KAK, LAKIP, LPPD dll)	6 Dokumen/ Laporan	6 Dokumen/ Laporan	40	6 Dokumen/ Laporan	30.110	6 Dokumen/ Laporan	40	6 Dokumen/ Laporan	40	6 Dokumen/ Laporan	40	
			Kegiatan :													
			1	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun		1 Laporan	8	1 Laporan	8.978	1 laporan	10	1 laporan	10	1 laporan	10
			3	Penyusunan Renja	Terlaksananya kegiatan penyusunan renja		2 Kali	10	2 Dokumen	5.154	2 kali	10	2 kali	10	2 kali	10
			4	Penyusunan RKA/DPA, RKAP/DPPA	Terlaksananya kegiatan penyusunan RKA/DPA, RKAP/DPPA		2 Kali	7.5	4 Dokumen	8.978	2 kali	10	2 kali	10	2 kali	10
5	Penyusunan Laporan Tindak Lanjut OPD/LHP	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Tindak Lanjut LHP		1 Laporan	14	1 Laporan	7	1 laporan	10	1 laporan	10	1 laporan	10			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program OPD Dan Kegiatan OPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
						Memperkuat Struktur dan Budaya Organisasi serta Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (T-2)	Meningkatnya Kualitas Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien(S-3)	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Skor Evaluasi Kinerja Pemerintah an Daerah (EKPD)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan :	Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Disiplin Aparatur (%)		60	982.253224	65	1,298.699
		1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		1 Tahun	60.253	1 Tahun	80	1 Tahun	100	1 Tahun	110	1 Tahun	120
		2	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		1 Tahun	7	1 Tahun	7	1 Tahun	7	1 Tahun	10	1 Tahun	8
		3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		1 Tahun	300	1 Tahun	300	1 Tahun	350	1 Tahun	385	1 Tahun	424
		4	Penunjang administrasi perkantoran	Tersedianya penunjang administrasi perkantoran		1 Tahun	450	1 Tahun	825.999	1 Tahun	900	1 Tahun	990	1 Tahun	1,089
		5	Penunjang operasional DAK perikanan	Tersedianya operasional DAK perikanan		1 Tahun	85	1 Tahun	55	1 Tahun	100	1 Tahun	110	1 Tahun	121
		6	Penunjang Operasional UPTD	Tersedianya operasional UPTD		1 Tahun	70			1 Tahun	95	1 Tahun	104.50	1 Tahun	110
		7	Peringatan Hari Nusantara	Terlaksananya peringatan hari Nusantara		1 Kali	10						-		-
		8	Penunjang operasional pelaksanaan penyediaan dokumen kontrak dan pencairan	Terlaksananya pengelolaan dokumen kontrak dan pencairan				1 Tahun	30.7	1 Tahun	70	1 Tahun	76	1 Tahun	85

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program OPD Dan Kegiatan OPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2017		2018		2019		2020		2021		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Memperkuat Struktur dan Budaya Organisasi serta Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (T-2)	Meningkatnya Kualitas Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien(S-3)	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Skor Evaluasi Kinerja Pemerintah an Daerah (EKPD)	Program : Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Presentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan (%)				70	220	80	735	90	356	95	376	
			Kegiatan :													
			1	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal				1 Tahun	30	1 Tahun	50	1 Tahun	55	1 Tahun	60.50
			2	Penyusunan rancangan peraturan bidang kelautan dan perikanan (Perda, Perbup, dan Perkadis)	Terlaksananya kegiatan Penyusunan rancangan peraturan bidang kelautan dan perikanan (Perda, Perbup, dan Perkadis)				1 Kali	70	-	-	-	-	-	-
			3	Sosialisasi peraturan perundangan-undangan bidang kelautan dan perikanan	Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundangan-undangan bidang kelautan dan perikanan				1 Kali	50	1 Kali	80	1 Kali	90	1 Kali	99.00
			4	Studi banding pengelolaan retribusi bidang perikanan	Terlaksananya study banding pengelolaan kawasan Pengembangan Perikanan				1 Kali	70						-
			5	Konferensi cagar biosfer di Peru	Terlaksananya Konferensi cagar biosfer di Peru											-
			6	Study banding kawasan pengembangan perikanan	Terlaksananya kegiatan Study banding kawasan pengembangan perikanan						1 Kali	200	1 Kali	100	1 Kali	100
			7	Peningkatan SDM teknis budidaya (magang)	Meningkatnya Pengetahuan dan SDM Teknis Budidaya						3 orang	55	3 orang	60.5	3 orang	66.55
			8	Pelatihan aplikasi GIS dan Drone	Terpetakannya Lokasi-lokasi Pembudidaya						1 kali	70				-
			9	Studi wawasan sentra nelayan	meningkatnya pengetahuan dan wawasan pengelola sentra nelayan						1 kali	100				-
			10	Bimtek pengawasan uji mutu hasil budidaya	Terlaksananya pengawasan uji mutu hasil budidaya						2 orang	50				-
			11	Magang alat penangkapan ikan di BBPI Semarang	Jumlah staf yang magang						3 orang	50	3 orang	50	3 orang	50.00
12	Studi pengelolaan BBI	Meningkatnya kapasitas SDM pengelola BBI (oang)							6	80				-		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program OPD Dan Kegiatan OPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
Memperkuat Struktur dan Budaya Organisasi serta Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (T-2)	Meningkatnya Kualitas Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien(S-3)	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Skor Evaluasi Kinerja Pemerintah an Daerah (EKPD)	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kantor		75	120.50	78.5	376.242	80	1,060	83	680	85	746			
			Kegiatan :															
			1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas roda dua				1 unit	20	5 unit	100						
			2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor				1 Tahun	72.12	1 tahun	100	1 tahun	100	1 tahun	100	1 tahun	120
			3	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor				6 Unit	53.1	1 tahun	170	1 tahun	180	1 tahun	180	1 tahun	200
			4	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan dinas yang dipelihara		1 Tahun	17.5	1 Tahun	35	1 tahun	50	1 tahun	50	1 tahun	50	1 tahun	55
			5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		1 Tahun	85	1 Tahun	85	1 tahun	100	1 tahun	100	1 tahun	100	1 tahun	110
			6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan gedung kantor				1 Tahun	10	1 tahun	10	1 tahun	10	1 tahun	10	1 tahun	11
			7	Pengadaan pakaian hari-hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian hari-hari tertentu				1 Tahun	60	1 Kali	60	1 Kali	65	1 Kali	65	1 Kali	70
			8	Penunjang operasional kapal perikanan	Terlaksananya penunjang operasional kapal perikanan				1 Tahun	41.022	1 tahun	70	1 tahun	75	1 tahun	75	1 tahun	80
			9	Perbaikan dan Pemeliharaan Kapal Monitoring DKP Selayar	terpeliharaya 1 unit kapal monitoring milik DKP		1 Tahun	18								-		-
			10	Pengadaan pagar, pintu pagar, paving block halaman kantor	Tersedianya pagar, pintu pagar, paving block halaman kantor						1 tahun	200	-			-		-
11	Pengadaan tiang bendera dan papan nama kantor permanent, tempat parkir	Tersedianya tiang bendera dan papan nama kantor permanent, tempat parkir						1 tahun	100	-			-		-			
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pabrik Es	Jumlah pabrik es yang direhabilitasi						2 unit	100	2 unit	100	2 unit	100	2 unit	100			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program OPD Dan Kegiatan OPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2017		2018		2019		2020		2021		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Memperkuat Struktur dan Budaya Organisasi serta Profesionalisme Aparatur Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien(S-3)	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penilaian akuntabilitas kinerja OPD	39	45	18	50	35.0690	60	125	65	130	70	360	
			Kegiatan :													
			1 Penyusunan LAKIP	Terlaksananya kegiatan penyusunan LAKIP dinas		1 Laporan	10	1 Laporan	8.605	1 laporan	10	1 laporan	10	1 laporan	10	
			2 Penyusunan Renstra	Terlaksananya penyusunan Renstra SKPD												150
			3 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dinas		1 Laporan	7.5	1 Laporan	5.872	1 laporan	10	1 laporan	10	1 laporan	10	
			4 Penyusunan LKPJ	Terlaksananya kegiatan Penyusunan LKPJ Dinas				1 Laporan	5.592	1 laporan	10	1 laporan	10	1 laporan	10	
			5 Sinkronisasi program dan kegiatan	Terlaksananya kegiatan Sinkronisasi program dan kegiatan				1 Tahun	15	1 tahun	45	1 laporan	50	1 laporan	80	
6 Forum OPD	Terlaksananya kegiatan forum OPD						1 tahun	50		50	1 laporan	100				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program OPD Dan Kegiatan OPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2017		2018		2019		2020		2021		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Memperkuat Struktur dan Budaya Organisasi serta Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (T-2)	Meningkatnya Kualitas Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien(S-3)	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	Program : Pengembangan Data dan Informasi	Presentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Kelautan dan Perikanan dan Transparan (%)		57	530	63	552.18	70.00	1,075.0	75.0	845.0	80.0	885.0	
			Kegiatan :													
			1	Pameran perikanan	Terlaksananya kegiatan Pameran perikanan		1 Kali	80	1 Kali	75	1 kali	100	1 kali	100	1 kali	100
			2	Pekan Raya Sul-Sel	Promosi Pengolahan Hasil Perikanan						1 Kali	50	1 kali	50	1 kali	50
			3	Penunjang operasional statistik perikanan	Penyediaan data statistik, pengolahan data, dan pendataan		1 Tahun	85	1 Tahun	92.18	1 Tahun	150	1 tahun	185	1 tahun	200
			4	Pelatihan enumerator statistik perikanan	Terlaksananya Pelatihan enumerator statistik perikanan				1 Kali	50	1 Kali	100	-	-	-	-
			5	Monitoring dan evaluasi kegiatan perikanan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan dinas kelautan dan perikanan		1 Tahun	90	1 Tahun	55	1 Tahun	100	1 tahun	120	1 tahun	120
			6	Pengadaan Drone	Tersedianya pengadaan Drone		1 unit	25								
			7	Worshop Grand Design pembangunan Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya workshop grand design pembangunan kelautan dan perikanan			250								
			8	Perencanaan Kegiatan	Terlaksananya kegiatan perencanaan Kegiatan				1 Tahun	30	1 Tahun	50	1 tahun	50	1 tahun	55
			9	Penyusunan Database Perikanan	Terlaksananya kegiatan database perikanan				1 Kali	250						
			10	Pengadaan aplikasi sistem informasi kelautan dan perikanan	Tersedianya aplikasi sistem informasi kelautan dan perikanan						1 tahun	80	-	-	-	-
			11	Penunjang Operasional sistem informasi kelautan dan perikanan	Prosentase Pengelolaan Sistem informasi bidang kelautan dan perikanan (%)						70	100	75	100	80	100
			12	Updating Peta Existing Lahan Budidaya	Prosentasi Tersedianya peta terkini untuk lahan budidaya (%)		-				100	40	100	50	100	60
13	Identifikasi Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar	Tersedianya data dan informasi mengenai kawasan budidaya air tawar		-				1 Paket	50							
14	Pendampingan program one data	Terlaksananya kegiatan pendampingan terhadapap program one data						1 tahun	30.0		30.00		30.00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program OPD Dan Kegiatan OPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
									15 Pemutakhiran data perikanan budidaya	Tersedianya data terkini untuk perikanan budidaya	-					1 Dokumen	85	1 Dokumen
			16 Penunjang Pelaksanaan Pendataan Produksi Perikanan pada Sentra Nelayan	Terlaksananya kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pada sentra nelayan						1 tahun	65	1 tahun	75	1 tahun	85			
			17 Penyusunan profil potensi usaha Kelautan dan Perikanan	tersedianya data potensi dan profil UKM kab kepulauan selayar				1 kali		1 kali	75	-	-	-	-			
Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan (T-6)	Menurunnya angka kemiskinan pada rumah tangga masy. pelaku usaha kelautan dan perikanan (S-8)	Berkurangnya jumlah Rumah Tangga Miskin pelaku usaha kelautan dan perikanan (Jumlah dan % KK)	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil		Persentase tutupan karang hidup (%)	43.18	43.18	100										
			Kegiatan :															
			1	Pelatihan Pramuwisata Selam	Terlaksananya Pelatihan Pramuwisata Selam		1 Kali	60										
			2	Pengadaan Mesin Tempel Pokmaswas	Tersedianya Mesin Tempel Pokmaswas		1 unit	40										
			Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan		Jumlah POKMASWAS yang terfasilitasi dan berperan aktif dalam pengawasan	15	15	146.85										
			Kegiatan :															
			1	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas				25										
			2	Kajian Identifikasi Spot Wisata Bahari dengan Biota Spesifik				121.85										

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program OPD Dan Kegiatan OPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
						Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan (T-6)	Menurunnya angka kemiskinan pada rumah tangga masy. pelaku usaha kelautan dan perikanan (S-8)	Berkurangnya jumlah Rumah Tangga Miskin pelaku usaha kelautan dan perikanan (Jumlah dan % KK)	Program : Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kegiatan :	Berkembangnya perikanan budidaya	810			930	595.2
1	Study wawasan ke lokasi pembudidaya ikan	Jumlah peserta yang mengikuti study wawasan					7 orang	50							
2	Lomba masak serba ikan	Terlaksananya lomba masak serba ikan					1 kali	45							
3	Bimtek pengembangan usaha pengolahan hasil budidaya	Jumlah peserta bimbingan teknis pengembangan usaha pengolahan hasil budidaya					30 orang	30							
4	Temu lapang budidaya air payau dan air laut	Terlaksananya pendampingan usaha kelompok pembudidaya ikan air payau dan air laut					1 kali	40							
5	Indonesia marine dan fishery expo	Promosi pengolahan hasil perikanan					1 kali	70							
6	Pendampingan kegiatan provinsi bidang pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan	Terlaksananya pendampingan provinsi					1 tahun	38							
7	Pendampingan usaha kelompok pembudidaya ikan air laut, air payau, dan air tawar	jumlah kelompok pembudidaya ikan yang diberikan pendampingan					5 kelompok	30							
8	Bimbingan teknis pengembangan budidaya air payau, air tawar, dan air laut	Jumlah peserta bimbingan teknis penanganan dan pengolahan hasil perikanan					30 peserta	48.6							
9	Promosi dan pengembangan produk perikanan	Terlaksananya kegiatan promosi pengembangan hasil perikanan					1 kali	75							
10	Pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan	terlaksananya kegiatan pemberdayaan usaha pembudidaya ikan					20 kelompok	85							
11	Kelembagaan Hukum Pembudidaya	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang memiliki akte notaris					12 kelompok	45							
12	Festival kuliner	terlaksananya festival kuliner					1 kali	38.6							

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program OPD Dan Kegiatan OPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2017		2018		2019		2020		2021		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan (T-6)	Menurunnya angka kemiskinan pada rumah tangga masy. pelaku usaha kelautan dan perikanan (S-8)	Berkurangnya jumlah Rumah Tangga Miskin pelaku usaha kelautan dan perikanan (Jumlah dan % KK)	Program : Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Persentase berkurangnya jumlah rumah tangga miskin pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	2962	na		na		26	600	33	845	41	785	
			Kegiatan :													
			1	Pelatihan pengoperasian kapal hand line tuna	Jumlah nelayan yang dilatih						30 orang	75		-	60 orng	100
			2	Pelatihan penggunaan alat tangkap modern dan ramah lingkungan	Jumlah nelayan yang dilatih						50 orang	100	50 orang	100	60 orng	100
			3	workshop pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan kecil	Terlaksananya workshop pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan kecil								1 Tahun	100		
			4	Pembuatan jalan produksi	Tersedianya jalan produksi bagi pelaku usaha budidaya air payau						157 m	200		200		200
			5	Sarana Penanganan Hasil Tambak Udang(Bak Pencucian Udang)	Tersedianya sarana penanganan hasil tambak udang	-					10 Buah	50	20 Buah	100	20 buah	100
			6	Penanganan Hama dan Penyakit Ikan	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap penanganan hama dan penyakit	-					20 Orang	50	20 Orang	60	20	60
			7	Studi Wawasan ke Lokasi Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Studi wawasan ke Lokasi Pembudidaya Ikan								1 kali	60		
			8	Pendampingan kegiatan provinsi bidang pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan	Terlaksananya Pendampingan kegiatan provinsi bidang pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan						1 Kali	50	1 Kali	50	1 Kali	50
2	Studi wawasan pengembangan perikanan tangkap	terlaksananya studi wawasan pengembangan perikanan tangkap								1 Tahun	100	1 Tahun	100			
10	Pemberdayaan kelompok pembudidaya	Terlaksananya Pemberdayaan kelompok pembudidaya						24 klp	75	24 klp	75	24 klp	75			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program OPD Dan Kegiatan OPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan (T-6)	Meningkatnya daya beli masyarakat (S-9)	Income per Kapita Penduduk (juta)	Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya	na					100	700	102	855	103	700		
			Kegiatan :	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB (Rp. Juta)	1038820.07					1,097,134.4		113591.4		1130295			
			1	Penguatan kelembagaan nelayan	Jumlah koperasi yang dibentuk						5 KN	75	5 KN	75			
			3	Workshop pengembangan bisnis perikanan tangkap	terlaksanan workshop pengembangan bisnis perikanan tangkap								40 Orang	80			
			4	Temu Usaha Bidang Perikanan tangkap	Terlaksananaya temu usaha						1 Tahun	75	1 Tahun	100	1 Tahun	100	
			5	Temu Lapang Perikanan Tangkap	Terlaksananya Temu Lapang Bidang Perikanan						1 Tahun	75		100		100	
			6	Temu Bisnis Perikanan	Terlaksananya Temu Bisnis Perikanan						1 kali	100	1 kali	100	1 kali	100	
			7	Fasilitasi hukum kelembagaan nelayan kecil	Jumlah koperasi yang dibentuk						5 koperasi	50	5 Koperasi	50	5 Koperasi	50	
			8	Temu Lapang Perikanan Budidaya	Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha perikanan budidaya	-					1 Kali	50	1 Kali	50	1 kali	50	
			9	Penerapan Sertifikasi CBIB	Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha perikanan budidaya mengenai CBIB dan tersedianya sertifikat CBIB bagi pelaku	-					5 Orang	50	5 Orang	50	5 Orang	50	
			10	Pembinaan kelembagaan pembudidaya Ikan	Terlaksananya Pembinaan kelembagaan pembudidaya						10 Klp	75	12 Klp	100	12 Klp	100	
			11	Kelembagaan Hukum Pembudidaya Ikan	Terfasilitasinya Kelembagaan Pembudidaya						12	50	12	50	12 klp	50	
			12	Pendampingan usaha kelompok pembudidaya ikan air laut, air tawar, dan air payau	Terlaksananya Pendampingan usaha kelompok pembudidaya ikan air lau, air tawar, dan air payau						7 Klp	50	7 Klp	50	7 Klp	50	
			13	Pembinaan lembaga keuangan Mikro	Terlaksananya pembinaan lembaga keuangan Mikro						10 LKM	50	10 LKM	50	10 LKM	50	
			14	Temu Usaha Perikanan Budidaya	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok pembudidaya						3 klp	100	3 klp	100	3 klp	100	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program OPD Dan Kegiatan OPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
						Meningkatkan daya saing dan investasi daerah (T-	Meningkatnya investasi (S-19)	Nilai PMDN (dalam Milyar Rupiah)	Program : Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kegiatan :	Jumlah Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)		123	650	126	
			1 Bimbingan Teknis Peningkatan Produk Bernilai	Terlaksananya Bimbingan Teknis			70								
			2 Bimbingan Teknologi, Penanganan, dan	Terlaksananya Bimbingan Teknologi,			70								
			3 Pengembangan Branding Produk Olahan Hasil	Tersedianya Branding Produk Olahan			70								
			4 Pengembangan Sistem Jaringan Informasi dan	Adanya Pertukaran Informasi bagi Pelaku			90								
			5 Pameran Indomafish Expo	Terlaksananya Pameran Indomafish Expo			65								
			6 Study Wawasan ke Sentra Pengolahan Hasil	Berkembanganya Pengetahuan Kelompok			80								
			7 Lomba Masak Serba Ikan tingkat Kabupaten dan Provinsi	Terlaksananya Lomba Masak Serba Ikan			65								
			8 Pendampingan Kegiatan Provinsi	Terlaksananya pendampinganKegiatan			70								
			9 Pembinaan PUMP	Terbinanya PUMP Pengolahan dan			70								
			Program : Sarana dan Prasarana Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kegiatan :	Persentase ketersediaan saran dan prasarana di pesisir dan pulau-pulau kecil		5	229.519150								
			1 Pembangunan Tracking Mangrove di Kelurahan	Tersedianya Pembangunan Tracking			100								
			2 Pembinaan Pengelola Lembaga Keuangan (LKM)	tersedianya Pembinaan Pengelola Lembaga Keuangan (LKM)			25								
			3 Pembangunan Tracking Mangrove di Desa	Tersedianya Pembangunan Tracking			100								
			4 Pembangunan Tracking Mangrove di Kelurahan	Tersedianya Pembangunan Tracking			4.51915								
			Program : Pencatatan dan Perizinan Budidaya Kegiatan :	Persentase pencatatan dan perikanan budidaya				25%	98.408						
			1 Pengadaan alat pengolah data					3 unit	13						
			2 Pengadaan kendaraan operasional roda dua petugas pendata SIUP, TPUP, dan TPI					1 unit	22						
			3 Penguatan kelembagaan LPSP					1 kali	63.408						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program OPD Dan Kegiatan OPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
						Meningkatkan daya saing dan investasi daerah (T-12)	Meningkatnya investasi (S-19)	Nilai PMDN (dalam Milyar Rupiah)	Program : Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Kegiatan :	Jumlah Produksi Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton) Konsumsi Ikan (Kg/Org/ Tahun)					
1	Indonesia Marine and Fishery Expo	Terlaksananya Indonesia Marine and Fishery Expo							1 kali	75	1 kali	75	1 kali	75	
2	Pengembangan Produk dan Usaha Pasca Panen Pembudidaya	Terlaksananya Pengembangan Produk dan Usaha Pasca Panen Pembudidaya							100%	100	100%	100	100%	100	
3	Peningkatan Investasi dan Perluasan Usaha Pasca Panen Pembudidaya	Terlaksananya Peningkatan Investasi dan Perluasan Usaha Pasca Panen Pembudidaya							100%	100	100%	100	100%	100	
4	Bimbingan teknis penanganan hasil tangkapan ikan atau budidaya	Peningkatan mutu nilai tambah produk perikanan							1 kali	50	1 kali	50	1 kali	50	
5	Bimtek pengembangan usaha pengolahan hasil budidaya	Terlaksananya Bimtek pengembangan usaha pengolahan hasil budidaya							1 Kali	30	1 kali	30	1 Kali	30	
6	Pengadaan alat uji mutu ikan	Tersedianya alat-alat uji mutu ikan hasil budidaya							1 paket	75					
7	Lomba masak serba ikan	terlaksananya lomba masak serba ikan							1 kali	50	1 kali	50	1 kali	50	
8	Festival Kuliner	terlaksananya festival kuliner							1 kali	50	1 kali	50	1 kali	50	
9	Sosialisasi Gemar Makan Ikan	terlaksananya sosialisasi gemar makan ikan							1 tahun	75	1 tahun	75	1 tahun	75	
10	Pembinaan Rangka Diversifikasi Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan	Terlaksananya Pembinaa Dalam Rangka Diversifikasi Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan							20 Klp	100	20 Klp	110	20 Klp	110	
11	Promosi dan pengembangan produk perikanan	Meningkatnya investasi perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar							1 kali	75	1 kali	75	1 kali	75	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program OPD Dan Kegiatan OPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman (T-13)	Peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan industry perikanan terpadu	Realisasi pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (%)	Program: Pembangunan Kawasan Industri Perikanan	Realisasi pembangunan Sentra Kawasan Industri Perikanan Terpadu (%)						25	5,789	40	6,400	65	5,500		
			Kegiatan :														
			1	Penyediaan Dokumen KIPT	Prosentase Ketersediaan dokumen pada KIPT						75%	450	100%	400			
			2	Pembangunan Infrastruktur pada KIPT	Prosentasi Tersedianya Infrastruktur sentra KIPT	-							40%	3,000	60%	3,500	
			3	Forum Investasi Bisnis Sentra Industri Perikanan Terpadu	Terlaksananya forum investasi bisnis sentra industri perikanan terpadu					1 kali	338.7						
			4	Pembebasan lahan							5,000		3,000		2,000		
				Program : Penyelenggaraan dan Pengelolaan TPI	Presentase Penyelenggaraan dan Pengelolaan TPI			65	1,165.8	70	750	70	1,000	75	800		
			Kegiatan :														
			1	Penunjang Operasional Bidang Pengelolaan TPI dan SIUP Budidaya	Terlaksananya kegiatan pengelolaan TPI dan penerbitan SIUP budidaya			1 Tahun	188	1 Tahun	100	1 tahun	100	1 tahun	100		
			2	Studi wawasan tata cara pelaksanaan kegiatan SIUP, TPUI, TPKPIH, serta TPI	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan sikap staf bidang pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, dan penertiban SIUP di bidang pembudidaya ikan			1 kali	60	-	-	-	-	-	-		
			3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sentra Nelayan	tersedianya sarana dan prasarana sentra nelayan						1 Paket	100	1 Paket	250	1 Paket	100	
			4	Pengadaan Sarana Pendukung TPI	Tersedianya sarana pendukung TPI			1 pkt	50	1 pkt	100	1 pkt	100	1 pkt	100		
			5	Pengadaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana TPI							1 pkt	200	1 pkt	250	1 pkt	200	
			6	Sosialisasi/Diseminasi/publikasi	Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi/publikasi						2 kali	50	2 kali	50	2 kali	50	
			7	Pembangunan TPI Mini	Terbangunnya TPI mini pada sentra-sentra nelayan						1 unit	200	1 unit	250	1 unit	250	
8	Lomba perahu layar	Terlaksananya kegiatan lomba perahu layar			1 kali	58											
9	Lomba tarik tambang diatas perahu	Terlaksananya kegiatan tarik tambang di atas perahu			1 kali	50											
10	Penunjang pelaksanaan pendataan produksi perikanan TPI	Terlaksananya kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI			4 dok	59.8											
11	Penyusunan masterplan kawasan sentra bisnis perikanan terpadu	Masterplan kawasan sentra bisnis perikanan terpadu			1 dok	400											
12	Pendampingan program konversi BBM ke BBG untuk nelayan	Terlaksananya kegiatan pendampingan pemasangan konverter gas			1 kali	300											

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program OPD Dan Kegiatan OPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
						Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman (T-13)	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan (S-23)	Peningkatan produksi perikanan dan kelautan	Program : pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan :	Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan pendapatan nelayan		28,992.66	4,014.022	31,312.07	6,178.279
1	Survey dan Verifikasi Data Asuransi Nelayan	Tersedianya Survey dan data Asuransi Nelayan				60.392									
2	Pendampingan Enumerator perikanan tangkap	Tersedianya data nelayan, alat tangkap dan produksi perikanan				72.438									
3	Pembuatan Kartu Nelayan	Tersedianya Kartu Nelayan				50									
4	Pameran Perikanan Tangkap	Adanya Promosi hasil dan kegiatan perikanan				80									
5	Temu Lapang Penangkapan Tuna Long Line Perikanan Samudra	adanya temu lapang penangkapan Tuna Long Line Perikanan Samudra				70									
6	Pelatihan Pengoperasian Kapal Hand Line Tuna	bertambahnya pengetahuan nelayan				49.5725									
7	Pelatihan Teknis Penangkapan Pole and Line	adanya pelatihan teknis penangkapan pole and line				59.0355									
8	Study Kelayakan Kawasan Sentra Bisnis Perikanan Terpadu	Tersedianya Study Kelayakan Kawasan Sentra Bisnis Perikanan Terpadu				300									
9	Pengadaan Sero	tersedianya pengadaan sero				149.95									
10	Pengadaan Mesin	jumlah mesin yang tersedia				100									
11	Pengadaan Jaring Tasi	tersedianya jaring tasi				165									
12	Pengadaan Perahu Ukuran 2 GT beserta Mesin, Alat Bantu dan Alat Penangkapan	Tersedianya 16 unit kapal penangkapan ikan untuk nelayan tradisional ukuran 2 GT				1400									
13	Pengelolaan Kegiatan DAK Perikanan Tangkap	Terlaksananya pengelolaan DAK perikanan				22.684									
14	Pengadaan Perahu Nelayan dan Alat Tangkapnya					200									
15	Pengadaan Sampan Fiber	tersedianya sampan fiber				348.2									
16	Pengadaan alat penangkap ikan					150									
17	Pengadaan Jaring Untuk Masyarakat					160									
18	Pengadaan Peralatan kapal					150									
19	Rehab. Tambatan Perahu Perikanan Desa Batang (luncuran 2016)					5									

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program OPD Dan Kegiatan OPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
						Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman (T-13)	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan (S-23)	Peningkatan produksi perikanan dan kelautan	20 Dana Alokasi Khusus (DAK) IPD						
			21 Jalan Kompleks dan Drainase				59.5								
			22 Pembangunan Breakwater				39.75								
			23 Air Bersih, Instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Es dan Instalasi Listrik				124.9								
			24 Kantor Administrasi Pelabuhan				41.5								
			25 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)				34.85								
			26 Pembangunan Pagar Pengamanan Kawasan (Pagar)				74.5								
			27 Tempat Pembuangan Sementara (TPS)				19.9								
			28 Pembangunan Kantor Pelayanan Terpadu				26.85								
			1 Pengadaan pancing rawe	Terlaksananya pengadaan pancing rawe				10 set	100						
			2 Pengadaan sero	jumlah sero yang diadakan				4 unit	100						
			3 Pengadaan perahu	jumlah perahu yang diadakan				102 unit	1,775						
			4 Pengadaan jaring	jumlah jaring yang diadakan				902 peace	600						
			5 Pengadaan mesin	jumlah mesin yang diadakan				99 unit	658.000						
			6 Magang alat penangkapan ikan di BBPI Semarang	Terlaksananya kegiatan magang alat penangkapan ikan di BBI Semarang				2 orang	25.000						
			7 Pendampingan asuransi nelayan	terlaksananya verifikasi asuransi nelayan				1 tahun	80.000						
			8 Pendampingan sertifikasi hak atas tanah nelayan	jumlah sertifikat tanah nelayan yang terbit				100 persil	75.000						
			9 Pembuatan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan	terlaksananya pembuatan kartu pelaku usaha perikanan tangkap				1 tahun	50.000						
			10 Pengadaan bubu	jumlah pengadaan bubu				200 unit	100.000						
			11 Studi wawasan perikanan tangkap	Terlaksananya kegiatan Studi wawasan perikanan tangkap				1 kali	70.000						
			12 Pembangunan Perahu Ikan Lebih Kecil dari 3 GT beserta mesin, Alat penangkapan Ikan dan alat bantu Penangkapan Ikan (DAK)	Jumlah Perahu Ikan lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan				31 unit	2,093.679						
			13 Pelatihan penggunaan alat tangkap modern dan ramah lingkungan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penggunaan alat tangkap modern dan ramah lingkungan				30 orang	50.000						
			14 Pengadaan peralatan pengolah data	tersedianya alat pengolah data berupa laptop, notebook, printer				8 unit	66.600						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program OPD Dan Kegiatan OPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
						Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman (T-13)	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan (S-23)	Peningkatan produksi perikanan dan kelautan	Program : Pengembangan Perikanan Budidaya	Berkembangnya perikanan budidaya		853.95	3048.977	879.57	3,492.00
			Kegiatan :												
			1	Pengadaan Bibit Kerapu Cantik	Jumlah bibit kerapu cantik (ekor) 7 cm		100.800								
			2	Pengadaan Mesin Pakan	Jumlah mesin pakan (unit)		50								
			3	Penunjang Operasional Pengelolaan KJA Percontohan	Terkelolanya percontohan KJA (paket)		50								
			4	Penunjang Operasional Pengelolaan Pakan	Terkelolanya mesin pakan dinas (Paket)		50								
			5	Percontohan Budidaya Rumput Laut (DAK)	tersedianya budidaya rumput laut		200								
			6	Pengadaan Bibit Ikan Kakap Putih	tersedianya bibit ikan kakap putih		100								
			7	Pengadaan Bibit Kerapu Macan	Jumlah bibit kerapu macan (ekor) 7 cm		200								
			8	Pengadaan Bibit Kerapu Tikus	Jumlah bibit kerapu tikus (ekor) 7 cm		200								
			9	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Cantang	tersedianya bibit ikan kerapu cantang		92.4								
			10	Pengadaan Bibit Ikan Bawal Bintang	Tersedianya bibit ikan bawal bintang		57.2								
			11	Pengadaan jaring sampling	Jumlah jaring sampling (unit)		22.5								
			12	Pengadaan Bibit Kepiting Bakau	Jumlah bibit kepiting bakau (ekor)		16								
			13	Pengelolaan Percontohan Budidaya Air Payau (Tambak Dinas)	terkelolanya percontohan budidaya air payau (paket)		50								
			14	Pengelolaan Escavator Dinas	terkelolanya escavator dinas (paket)		18								
			15	Percontohan Budidaya Udang Vaname (DAK)	tersedianya percontohan udang vaname		200								
			16	Percontohan Budidaya Ikan Bandeng (DAK)	tersedianya percontohan Ikan bandeng		100								
			17	Pengadaan Bibit Udang dan Pakan Udang Vaname	tersedianya bibit udang dan pakan udang vaname		150								
			18	Percontohan Budidaya Udang Vaname Semi intensif	Tersedianya prasarana dan sarana pembelajaran budidaya udang vaname		320.177								
			19	Temu teknis CBIB	Terlaksananya Temu teknis CBIB (paket)			40							
			20	Magang kerja perikanan budidaya	TerlaksananyaMagang kerja perikanan budidaya (paket)			40							
			21	Penanganan hama dan penyakit ikan	Terlaksananya Penanganan hama dan penyakit ikan(paket)			30							

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program OPD Dan Kegiatan OPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
						Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman (T-13)	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan (S-23)	Peningkatan produksi perikanan dan kelautan	22	Temu lapang perikanan budidaya	Terlaksananya Temu lapang perikanan budidaya(paket)		60		
			23	Penguatan kelembagaan pembudidaya (akte)	Terlaksananya Penguatan kelembagaan pembudidaya		50								
			24	Pengadaan mesin pakan	tersedianya mesin pakan		31								
			25	Pengelolaan Percontohan budidaya air tawar	Terkelolanya percontohan budidaya air tawar (paket)		30								
			26	Percontohan Budidaya Ikan Nila (DAK)	tersedianya percontohan budidaya ikan hias		50								
			27	Percontohan Budidaya IkanLele (DAK)	tersedianya percontohan budidaya ikan lele		100								
			28	Percontohan Budidaya Ikan Gurame (DAK)	tersedianya percontohan budidaya ikan Gurame		100								
			29	Pengadaan Bibit Ikan Gurame dan pakan	tersedianya percontohan budidaya ikan Gurame		200								
			30	Pembuatan Kartu Pembudidaya (Aqua Card)	Jumlah Kartu Aqua Card (Buah)		60								
			31	Pemutakhiran Data Perikanan Budidaya	Terlaksananya updating data perikanan budidaya (dokumen)		50								
			32	Penunjang Operasional Perikanan Budidaya	Adanya penunjang operasional perikanan budidaya (paket)		65								
			33	Pendampingan Program Propinsi	Adanya anggaran pendampingan program propinsi (paket)		50								
			34	Pembinaan PUMP Perikanan Budidaya	Tersedianya operasional PUMP Perikanan Budidaya		43.7								
			35	Temu Usaha Budidaya	Jumlah Temu Usaha yang Terlaksana		67.2								
			36	Pengembangan Jalan Produksi Desa Bontobulaeng Kec. Pastim (luncuran)			5								
			1	Pendampingan program provinsi	Terlaksananya pendampingan program provinsi			1 tahun	70						
			2	Pengadaan bibit dan pakan udang vaname	Jumlah bibit udang vaname yang diadakan			2.352.900 ekor	402.16						
			3	Pengadaan bibit kerapu cantik	jumlah kerapu cantik			10.000 ekor	202.16						
			4	Pengelolaan Escavator dinas	Terlaksananya Pengelolaan Escavator dinas			1 kali	94						
			5	Magang kerja perikanan budidaya	terlaksananya kegiatan Magang kerja perikanan budidaya			3 orang	50						
			6	Penanganan hama dan penyakit ikan	terlaksananya Penanganan hama dan penyakit ikan			20 pembudidaya	50						
			7	Temu lapang perikanan budidaya	terlaksananya temu lapang perikanan budidaya			1 kali	90						
			8	Pemuktahiran data perikanan budidaya	tersedianya data terbaru perikanan budidaya			4 dokumen	75						
			9	Penunjang operasional perikanan budidaya	terlaksananya kegiatan operasional budidaya			1 tahun	141.58						
			10	Penunjang operasional pengelolaan pakan	terlaksananya penunjang operasional pengelolaan pakan			1 tahun	19						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program OPD Dan Kegiatan OPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
						Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman (T-13)	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan (S-23)	Peningkatan produksi perikanan dan kelautan	11 Pengadaan sarana penanganan hasil tambak udang	tersedianya sarana penanganan hasil tambak udang			10 unit	52.06	
			12 Pengelolaan percontohan budidaya air payau (tambak dinas)	Tersedianya tambak percontohan dinas			1 tahun	138							
			13 Pengembangan budidaya rumput laut	terlaksananya pengembangan budidaya rumput laut			1 kali	102.06							
			14 Pengadaan bibit ikan lele dan pakan	tersedianya bibit dan pakan ikan lele			1 kali	180.06							
			15 Pengadaan keranjang (rumput laut)	tersedianya keranjang untuk pembudidaya			1.000 buah	202.06							
			16 Pengadaan para-para penjemuran rumput laut	tersedianya para-para penjemuran rumput laut			40 unit	102.06							
			17 Penunjang operasional pengelolaan KJA	Terlaksananya Penunjang operasional pengelolaan KJA			1 tahun	50							
			18 Pembuatan kartu pembudidaya (KUSUKA)	Tersedianya data untuk membuat kartu pembudidaya			1 dokumen	44							
			19 updating existing lahan budidaya	adanya peta existing lahan budidaya terkini			9 lembar	38							
			20 Penerapan sertifikasi cara budidaya ikan baik (CBIB)	Terlaksananya Kegiatan Penerapan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Baik			1 Tahun	70							
			21 Sosialisasi Asuransi Pembudidaya	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Asuransi Pembudidaya			60 orang	50							
			22 Pelaksanaan Event Wisata Hari Jadi Selayar	Terlaksananya Event Wisata hari jadi Selayar			1 kali	100							
			23 Pengadaan Alkon dan Mesin Pompa	Jumlah Alkon Budidaya dan Mesin Pompa			7 Unit	146.16							
			24 Pengadaan Jaring Pembudidaya	Terlaksananya Pengadaan Jaring Pembudidaya			100 unit	354.32							
			25 Pengadaan Pakan dan Bibit Bandeng	Terlaksananya Pengadaan Bibit dan Pakan ikan Bandeng			1 Kali	202.16							
			26 Sarana Penganan Hasil Panen	Terlaksananya Pengadaan Sarana Penanganan Hasil Panen			75 Unit	152.16							
			27 Pengembangan Budidaya Ikan Bandeng	Terlaksananya Percontohan Budidaya Air Payau (Pengembangan Budidaya Ikan Bandeng dan Semi Intensif)			1 Paket	315							
			Program : pengembangan UPTD Hatchery Baloiya/BBI Kegiatan :		Meningkatnya kapasitas produksi perbenihan (ekor)			80,000	234.835						
			1	Penunjang Operasional UPTD BBI Baloiya	Tersedianya Biaya Penunjang Operasional UPTD BBI Baloiya			1 Tahun	54.835						
			2	Pengelolaan Pemeliharaan pakan alami	Tersedianya Pakan Alami Untuk Benih Udang Yang Memadai di BBI			1 Tahun	30						
			3	Pengadaan peralatan UPTD BBI Perbenihan (Paket Resirkulasi dan Aerasi)	Tersedianya peralatan perbenihan memadai di kantor BBI Baloiya			1 Tahun	100						
			4	Pengelolaan Pemeliharaan Pentokolan Udang	Peningkatan Produksi tokolan Windu			80.000 ekor	50						

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program OPD Dan Kegiatan OPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2017		2018		2019		2020		2021			
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman (T-13)	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan (S-23)	Peningkatan produksi perikanan dan kelautan	Program : Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya						905.96		933.14		961.13			
			Kegiatan :	dan Jumlah Benih/ Tokolan Udang di BBI (ekor)						160,000	3,487	192,000	2,603	432,000	3,624		
			1	Pengadaan Sarana dan prasarana budidaya rumput laut	Tersedianya sarana dan prasarana budidaya rumput laut							1 Paket	100.000	1 Paket	100.000	1 Paket	100.00
			2	Kebun bibit rumput laut	Tersedianya kebun bibit rumput laut							1 Unit	50	1 Unit	50	2 Unit	100
			3	Pengadaan Jaring Keramba	Tersedianya jaring keramba bagi pelaku usaha budidaya perikanan							40 Unit	200.000	40 Unit	200.000	40 unit	200
			4	Pengadaan Keramba Jaring Apung	Tersedianya Keramba Jaring apung							5 Unit	200	5 Unit	220	8 Unit	420
			5	Pengadaan Bibit Ikan Untuk Budidaya Air Laut	Tersedianya bibit bagi pelaku usaha budidaya air laut							10.000 Ekor	200.000	10.000 Ekor	200.000	10000 ekor	200.00
			6	Review Rencana Zonasi Budidaya Rumput Laut	Tersedianya dokumen review rencana zonasi budidaya rumput laut									1 dokumen	75.0		
			7	Pengelolaan Mesin Pakan	Tersedianya operasional untuk pengelolaan mesin pakan dinas							300 Kg	25	300 Kg	25	600 kg	50
			8	Tambak Percontohan semi intensif udang vannamei (pintu monik)	Tersedianya pintu monik untuk tambak percontohan semi intensif udang vannamei							4 Unit	100	4 Unit	100	8 Unit	250
			9	Pengadaan Mesin Alkon dan Pompa	Tersedianya mesin alkon dan mesin pompa bagi pelaku usaha budidaya air							1 paket	260	1 paket	260	-	-
			10	Rehabilitasi Saluran Tambak	Tersedianya saluran tambak yang representatif untuk budidaya air payau							150 m	250	150 m	250	150 m	250
			11	Pengembangan Budidaya Air Payau	Tersedianya pakan, bibit, dan sarana penunjang untuk budidaya air payau							2 Paket	350	2 Paket	285	4 Paket	645
			12	Pengelolaan Percontohan Budidaya Air Payau	Tersedianya operasional bagi tambak dinas							1.14 Ha	100	1.14 Ha	100	1.14 Ha	100
			13	Pengelolaan Eskavator Dinas	Tersedianya operasional untuk eskavator dinas							10 Ha	50	10 Ha	50	10 Ha	50
			14	Pembangunan Kolam Percontohan budidaya ikan air tawar	Tersedianya kolam bagi pelaku usaha budidaya air tawar							10 Unit	100	10 Unit	50	10 Unit	50
			15	Pengadaan Bibit dan Pakan Budidaya Ikan Air Tawar	Tersedianya bibit dan pakan bagi pelaku usaha budidaya ikan air tawar							1 Paket	150	1 Paket	150	1 Paket	150
			16	Asuransi Pembudidaya	Tersedianya asuransi bagi pembudidaya							30 Orang	15	30 Orang	16	60 Orang	31
			17	Sertifikasi Lahan Tambak Pembudidaya	Terlaksananya sertifikasi lahan tambak bagi pembudidaya							50 Persil	50	100 Persil	100	50 Persil	50
			18	Pendampingan program provinsi	Adanya pendampingan program provinsi							1 kegiatan	77				
			19	Kartu Aqua Card - KUSUKA	Tersedianya aqua card bagi pembudidaya							25 Buah	50	25 Buah	50	25 buah	50
			20	Pengembangan Jalan Produksi	Tersedianya jalan produksi bagi pelaku usaha budidaya air payau							1 Paket	300			1 paket	500
21	Pembudidaya Lele di Kolam	Jumlah kolmbibit lele di kolam							10 Paket	100							
22	Percontohan Budidaya Ikan Hias	Jumlah bibit ikan hias							1 Paket	100							

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program OPD Dan Kegiatan OPD	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2017		2018		2019		2020		2021	
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
						Meningkatkan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman (T-13)	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan (S-23)	Peningkatan produksi perikanan dan kelautan	23	Penunjang Operasional Perikanan Budidaya	Tersedianya operasional untuk perikanan budidaya				
			24	Paket Percontohan Budidaya Udang Tradisional	Tersedianya percontohan budidaya udang tradisional										
			25	Paket Percontohan Nila di Kolam/Tambak	Tersedianya percontohan Nila di kolam/tambak										
			26	Paket Percontohan Budidaya Gurame	Tersedianya percontohan budidaya Gurame										
			27	Paket Budidaya Patin di Kolam (Percontohan Budidaya Air Tawar)	Tersedianya budidaya patin di kolam										
			28	Paket Budidaya Ikan Nila/Udang Galah dengan Padi (MINAPADI)	Tersedianya paket budidaya ikan nila/udang galah dengan padi										
			29	Paket Polikultur Udang, Bandeng, Rumpun Laut	Tersedianya polikultur udang, bandeng, rumput laut										
			30	Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	Terlaksananya pengelolaan irigasi tambak partisipatif										
			31	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan											
			32	Paket Pengukuran pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih (timbangan, DO meter, pH Meter, termometer, Mikroskop, water quality testik)	Jumlah pengadaan timbangan, DO meter, pH Meter, termometer, Mikroskop, water quality testik)					1 paket	100				
			33	Instalasi aerasi (hi blow, selang aerasi, batu aerasi, instalasi pipa)	Jumlah Pengadaan hi blow, selang aerasi, batu aerasi, instalasi pipa					1 paket	150		-		-
			34	Paket Resirkulasi Aerasi (filterbiologi, filter mekanik, pompa celup, instalasi pipa, unit ultraviolet)	Jumlah pengadaan filterbiologi, filter mekanik, pompa celup, instalasi pipa, unit ultraviolet					1 paket	100		-		-
			35	Paket Pemeliharaan Larva (Plankton Net, Happa, Corong Penetasan Artemia, Heater)	Jumlah Paket pemeliharaan Larva										
			36	Pengelolaan Pentokolan udang	peningkatan produksi tokolan windu/vaname di BBI Baloiya					1 paket	100		100		100
			37	Pengelolaan Pemeliharaan pakan alami	Tersedianya pakan alami untuk benih udang yang memadai di BBI Baloiya					1 paket	50		50		50
			38	Pengadaan Peralatan Perbenihan	Tersedianya sarana penunjang kegiatan perbenihan di kantor BBI Baloiya					1 paket	60		72		79
			39	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan											
TOTAL KESELURUHAN										9,879.121	14,276.822	25,313	24,349	23,438	#

Benteng,

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,

Ir. Makkawaru
Nip. 19630120 198910 1 003

#REF!

